



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

**ANALISIS KEBIJAKAN TIONGKOK MENGHENTIKAN KEGIATAN  
IMPOR BATU BARA AUSTRALIA TAHUN 2018-2020**

**Diajukan oleh:  
Zhalika Liliandana  
17323078**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**

**ANALISIS KEBIJAKAN TIONGKOK MENGHENTIKAN KEGIATAN  
IMPOR BATU BARA AUSTRALIA TAHUN 2018-2020**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi  
Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia Guna Memenuhi Sebagai  
Memperoleh Derajat S1 Hubungan Internasional



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

**Disusun**

**Zhalika Liliandana**

**17323078**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul:

**ANALISIS KEBIJAKAN TIONGKOK MENGHENTIKAN KEGIATAN  
IMPOR BATU BARA AUSTRALIA TAHUN 2018-2020**

Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Syarat Sebagaimana Dari Syarat-Syarat Guna Memperoleh Derajat

Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

**10 Juni 2021**

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

(Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A)

**Dewan Penguji:**

1. Muhammad Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D.
2. Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A
3. Hasbi Aswar S.IP., M.A.
4. Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A

**Tanda Tangan**



## PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zhalika Liliandana

NIM 17323078

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : ANALISIS KEBIJAKAN TIONGKOK MENGHENTIKAN KEGIATAN IMPOR BATU BARA AUSTRALIA TAHUN 2018-2020.

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan Tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karena jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara menyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 Juni 2021



Zhalika Liliandana



## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### Alhamdulillahirabbil'alamin

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

#### **Ayah, Ibu dan Popo**

Atas segala doa, dukungan, perjuangan, pengorbanan, nasehat, semangat yang tak terhingga, yang telah diberikan selama ini

#### **Semua Keluarga Besar**

Terima kasih atas, doa, nasehat dan dukungannya yang telah diberikan selama ini

#### **Rekan-Rekan HI UII Angkatan 2017**

Terima kasih atas kebersamaan, kegembiraan, serta perjuangan bersama selama kuliah di HI UII

## HALAMAN MOTO

*"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan"*

(Q.S Al-Insyirah: 5)



## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah subhanallahu wa ta'allah Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih dan Maha Penyangan. Atas segala nikmat, rahmat, dan karunia yang telah diberikan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik hingga selesai. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya.

Penulis juga menyadari bahwa, dalam menyelesaikan skripsi ini telah banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dorongan, doa, serta dukungan dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada saya.
2. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc. Ph.D.
3. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int.St., M.A selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Muhammad Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, terimakasih telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas akhir saya. Terimakasih telah memberikan saya banyak



saran dan masukan selama saya mengerjakan tugas akhir saya. Terimakasih sudah meluangkan waktu bapak untuk membimbing saya sampai tahap ini. Memberikan saya masukan-masukan terkait tugas akhir saya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir saya. Tanpa bantuan dan dukungan dari bapak saya mungkin tidak bisa sampai di tahap ini. Saya memohon maaf jika selama saya menjadi mahasiswa bimbingan bapak saya melakukan kesalahan, dan memohon maaf untuk waktu yang tersita dan melelahkan dalam membimbing saya dalam proses penulisan tugas akhir. Semoga pak Zulfikar selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

6. Seluruh dosen dan staff prodi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Terimakasih atas ilmu dan pelajaran yang telah diberikan kepada saya selama saya kuliah di Universitas Islam Indonesia.
7. Kepada keluarga saya, terutama Orangtua, Kakak dan para adik saya. Terimakasih atas doa, dukungan, semangat dan segala yang telah diberikan kepada saya sampai saya bisa duduk dibangku perkuliahan dan saya bisa menyelesaikan kuliah saya. Terimakasih atas pengorbanan, keringat dan kasih sayang yang diberikan kepada saya. Terimakasih sudah selalu mendukung, menjadi penyemangat dikala suntuk serta memberikan yang terbaik untuk saya tanpa mengeluh sedikitpun, tanpa ibu dan bapak saya tidak bisa sampai di titik sekarang. Terimakasih untuk Mama dan Alm. Papa yang sudah menjadi orang tua terbaik untuk saya. Semoga Mama diberikan umur yang panjang, kesehatan, perlindungan oleh Allah SWT dan selalu dilancarkan

rezekinya dalam setiap langkahnya. Serta Papa yang semoga selalu bahagia dan bangga dengan saya anandamu yang melihat dari Surga.

8. Wifda Rizqi Nafid, Iga Mayank Anggraini, Navida Azizah terimakasih sudah menjadi sesosok teman yang baik, yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta menjadi penghibur dikala seluruh kesedihan saya selama ini. Terimakasih sudah menjadi saudara, teman, sahabat yang selalu mendengarkan cerita dan tempat berkeluh kesah.
9. Terimakasih kepada Dewi Ratna Wati dan Vina Trizka Dayanti. Terimakasih sudah menjadi teman, sahabat, keluarga yang sudah memberikan dukungan, semangat dan doa kepada saya. Terimakasih sudah mau mendengarkan keluh kesah, cerita dari saya. Terimakasih sudah memberikan saran-saran terbaik dan hiburan yang selalu menjadi penyemangat. Terimakasih sudah menjadi sahabat sampai saat ini dan seterusnya.
10. Terimakasih kepada Nesia Maya Mahardika, Kustya Afna Chairunnisa, Gita Febriana Dila, dan Wafda Nanda Putri sudah menjadi teman, sahabat, dan keluarga selama saya kuliah di HI UII. Terimakasih sudah banyak membantu, memberikan masukan, tempat berkeluh kesah dan memberikan hiburan. Terimakasih sudah menjadi teman dan sahabat terbaik saya selama kuliah sampai saat ini dan seterusnya.
11. Terimakasih kepada Nadyya Maulidiyanti, orang baik yang sudah bersedia menjadi teman saya dan tutor pribadi saya dalam membimbing saya di masa perkuliahan. Terimakasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan saya saran dan masukan dalam hal apapun ketika saya dilanda

kebingungan. Terimakasih atas semangat, doa dan dukungannya. Terimakasih sudah menjadi teman dan sahabat sampai saat ini dan seterusnya.

12. Terimakasih kepada Adhitya Makayasa sudah menjadi sosok orang yang selalu ada, selalu memberikan bantuan, semangat dan dukungannya. Terimakasih sudah mendengarkan cerita dan keluh kesah dan selalu memberi hiburan. Terimakasih selalu membuat tertawa dan menghibur dengan hal-hal sederhana. Terimakasih sudah menjadi teman dalam segala hal sampai saat ini dan seterusnya.
13. Terimakasih kepada seluruh warga HIMASAKTI Yogyakarta 2017 yang sudah menjadi teman-teman seperjuangan saya yang selalu bersedia untuk saya mintai pertolongan. Terimakasih atas bantuan, kenangan dan hiburan yang diberikan. Terimakasih sudah menjadi teman sampai saat ini dan seterusnya.
14. Terimakasih kepada seluruh anggota SRIKANDI UII sudah menjadi teman terbaik seperjuangan yang baik dalam membantu saya menjalankan Srikandi UII. Terimakasih semangat, dukungan dan doa-doa yang diberikan. Terimakasih sudah menjadi teman dan sahabat sampai saat ini dan seterusnya.
15. Semua pihak yang turut memberi dukungan dalam bentuk doa, materi, semangat, serta nasehat kepada saya.

## ABSTRAK

Sebagai negara importir batu bara terbesar di dunia, beberapa tahun terakhir Tiongkok telah mengeluarkan kebijakan untuk menghentikan kegiatan impor batu bara Australia ke Tiongkok. Akibat hal tersebut hubungan antara Tiongkok dan Australia mengalami kerenggangan yang cukup serius. Namun di tengah-tengah kejadian tersebut, selain pelarangan impor batu bara Australia, Tiongkok juga melakukan pemboikotan terhadap daging sapi yang diimpor dari Australia. Selain itu, Tiongkok juga melakukan beberapa pemaksaan ekonomi seperti pemberlakuan tariff terhadap jelai Australia. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi kebijakan Tiongkok mengenai pemberhentian batu bara Australia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Realisme Defensiv oleh Kenneth Waltz yang berfokus pada salah satu usaha negara dalam menyeimbangkan kekuasaannya untuk mempertahankan kepentingannya di dalam sistem, serta Realisme Ofensif oleh John Mearsheimer yang menganggap bahwa untuk bertahan di dalam sistem yang anarki dunia haru memaksimalkan kekuasaannya. Tiongkok sebagai negara superpower memiliki banyak kepentingan yang berhubungan dengan negara lain seperti Australia. Namun hubungan Australia menjadi memburuk sejak Australia melakukan pelarangan masuknya jaringan 5G Huawei di negaranya. Sengketa antara kedua negara tersebut masih berlanjut hingga saat ini.

**Kata Kunci:** Pelarangan Impor Batubara, Australia, Tiongkok, 5G Huawei, Laut Cina Selatan, Realisme Defensif dan Ofensif

## ABSTRACT

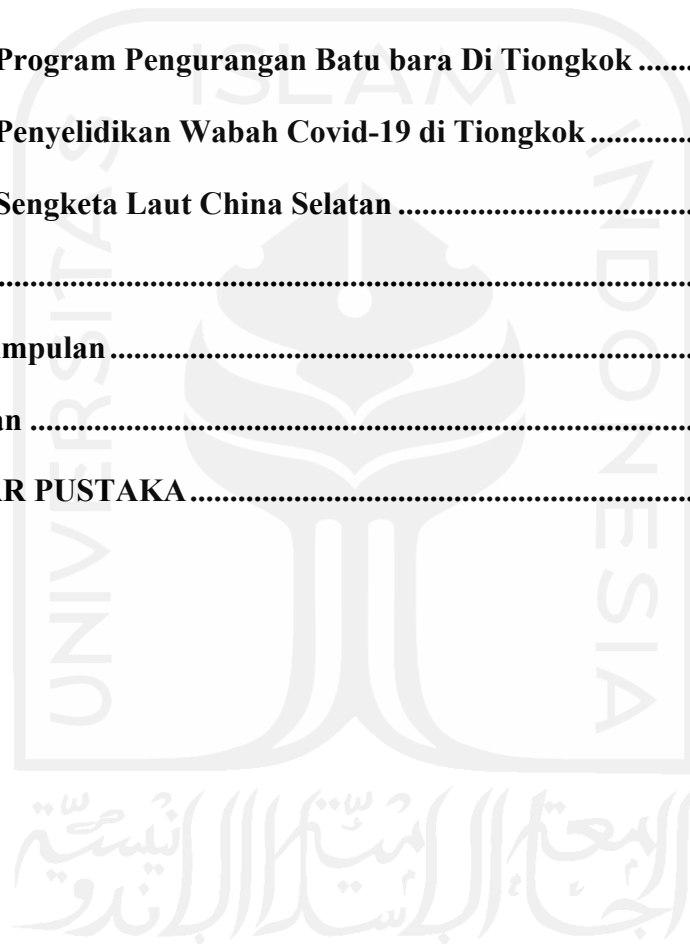
*As the largest coal importing country in the world, in recent years China has issued a policy to stop Australian coal imports to China. As a result, the relationship between China and Australia has experienced a serious estrangement. But in the midst of this incident, in addition to the ban on imports of Australian coal, China also boycotted beef imported from Australia. In addition, China also carried out several economic coercions such as the imposition of tariffs on Australian barley. This study attempts to analyze the factors that influence China's policy regarding the termination of Australian coal. In this study, the author uses the theory of Defensive Realism by Kenneth Waltz which focuses on one of the efforts of the state in balancing its power to defend its interests in the system, and Offensive Realism by John Mearsheimer which considers that to survive in an anarchic system the world must maximize its power. China as a superpower has many interests related to other countries such as Australia. But Australia's relations have deteriorated since Australia banned the entry of Huawei's 5G network in its country. The dispute between the two countries continues to this day.*

**Keywords:** Banned Coal Import, Australia, Tiongkok, 5G Huawei, South China Sea, Realisme Deffensive and Offensive

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>15</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>15</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>15</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>19</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>19</b>
<b>D. Signifikansi .....</b>	<b>19</b>
<b>E. Cakupan Penelitian .....</b>	<b>20</b>
<b>F. Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>21</b>
<b>G. Landasan Teori/Konsep/Model .....</b>	<b>27</b>
<b>H. Metode Penelitian.....</b>	<b>30</b>
<b>1. Jenis Penelitian .....</b>	<b>30</b>
<b>2. Subjek dan Objek Penelitian .....</b>	<b>31</b>
<b>3. Metode Pengumpulan Data.....</b>	<b>31</b>
<b>4. Proses Penelitian .....</b>	<b>31</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>32</b>

2. 1 Proses Pemberhentian Ekspor Batu Bara Australia ke Tiongkok.....	35
2. 2 Banned 5G Huawei oleh Australia .....	39
<b>BAB III .....</b>	<b>45</b>
3.1 Model Realisme Ofensif dalam Memaksimalkan Kekuasaan Tiongkok untuk Menjadi Penguasa Tunggal dengan Pengembangan 5g Huawei.....	47
3.2 Model Realisme Defensif dalam Mempertahankan Kepentingan Tiongkok .....	55
3.2.1 Program Pengurangan Batu bara Di Tiongkok .....	56
3.2.2 Penyelidikan Wabah Covid-19 di Tiongkok.....	65
3.2.3 Sengketa Laut China Selatan .....	71
<b>BAB IV.....</b>	<b>78</b>
4.1 Kesimpulan.....	78
4.2 Saran .....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>83</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari batuan sedimen yang terbakar dan merupakan endapan dari tumpukan bahan organik seperti tumbuhan yang melalui proses tertentu selama kurang lebih memakan waktu 300 tahunan. CNBC Indonesia (2019) memberikan informasi yang menuliskan bahwa Australia merupakan salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Endapan batu bara ini banyak dijumpai di negara bagian Queensland dan New South Wales. Jenis batu bara yang dihasilkan dari salah satu wilayah ini adalah batu bara hitam, yang mana batu bara sejenis ini merupakan bahan yang bagus dalam hal pembuatan baja. Di setiap tahunnya wilayah ini masing – masing dapat menghasilkan sampai 85 juta ton setiap tahunnya. Oleh karena itu, Australia melakukan kegiatan ekspor batu bara yang merupakan salah satu pemasukan terbesar dari negara Australia ini sendiri.

Tiongkok juga merupakan salah satu negara penghasil batu bara dan sekaligus merupakan salah satu negara yang melakukan impor batu bara terbesar, salah satunya dari Australia. Tiongkok menjadi target pasar terbesar Australia dalam melakukan kegiatan ekspor batu bara. Pangsa Tiongkok untuk ekspor Australia adalah lebih dari tiga kali pangsa impor dunianya. Di mana pada tahun 2009, Tiongkok adalah eksportir terbesar

dunia dengan pangsa 9,6 persen, dan importir terbesar kedua dengan pangsa 7,9 persen (WTO 2010). Hubungan bilateral yang telah terjalin antara Tiongkok dan Australia sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Hubungan ini menjadi semakin baik dan dekat ketika dibentuknya perjanjian dagang yang disepakati oleh keduanya yang berlaku pada 20 Desember 2015 yang kita kenal dengan sebutan ChAFTA atau *China-Australia Free Trade Agreement*.

Namun, pada Februari 2019 lalu, Tiongkok telah mengeluarkan kebijakan mengenai pemberhentian impornya terhadap batu bara yang berasal dari Australia. Sebenarnya tidak benar – benar diberhentikan, hanya saja dilakukannya pembatasan pemasukan yang menjadikan adanya perlambatan proses masuknya batu bara ke Tiongkok, yang mana proses pengiriman yang biasanya melewati proses pemeriksaan yang hanya dilakukan selama 25 hari sekarang berubah menjadi 40 hari. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa petugas bea cukai yang berbasis di pelabuhan utara Dalian menghentikan impor batu bara Australia dan mencoba untuk membatasi impor melalui pelabuhan mereka sebesar 12 juta ton per tahun. Petugas bea cukai Dalian mengawasi impor melalui lima pelabuhan yaitu Dalian, Bayuquan, Panjin, Dandong dan Beiliang. Sumber dari Reuters juga memberikan informasi bahwa ada seorang pedagang batu bara yang berada di Beijing yang mengatakan bahwa Dalian telah membersihkan sekitar enam juta ton batu bara pada Januari lalu yang telah tertunda sejak akhir 2018 silam karena Tiongkok memperlambat bea cukai untuk mengekang



impor. Kargo yang tertunda tidak akan dimasukkan ke dalam 12 juta ton di bawah kuota 2019.

Adapun yang dianggap melatarbelakangi keputusan ini adalah pengaruh kebijakan yang dikeluarkan oleh Australia mengenai pelarangan Huawei, di jaringan 5G teknologi komunikasi dari Tiongkok untuk masuk ke negaranya sejak Agustus 2018 lalu dengan alasan keamanan seperti apa yang telah dikatakan oleh Perdana Menteri Australia ini sendiri. Yang mana dalam jaringan 5G, penekanannya lebih kepada perangkat lunak daripada perangkat keras. Itu berarti penyedia peralatan, atau bahkan pihak ketiga yang memiliki niat kurang baik dapat memperoleh akses, serta berpotensi dapat memiliki pandangan yang lebih jelas tentang apa yang terjadi di dalam jaringan ini seperti memantau transfer data, melacak lokasi pengguna ponsel atau bahkan menguping pembicaraan ketika melakukan telepon. Hubungan antara Tiongkok dan Australia sebenarnya sudah mulai memanas sejak pada tahun 2017 ketika Canberra menuduh Tiongkok mencampuri urusan negara mereka.

Melihat hal ini Tiongkok mengatakan bahwa Australia telah melakukan "diskriminatif" dan melanggar aturan perdagangan global. Alasan Tiongkok memberhentikan impor batu bara dari Australia ini dicurigai karena didasari tidak jauh-jauh karena kepentingan politik, yaitu sebagai tindak lanjut atau pembalasan yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap apa yang telah dilakukan oleh Australia terkait dengan masalah pelarangan Australia terhadap masuknya jaringan 5G Huawei di Australia. Tetapi di sisi lain, Tiongkok membantah hal tersebut dan mengeluarkan

pernyataan yang mengatakan bahwa perlambatan impor batu bara ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan batu bara domestik, mengurangi dampak dari polusi udara, serta untuk memberlakukan hak – hak hukum yang ada.

Karena perlambatan yang terjadi ini tidak bisa diprediksi oleh siapapun, maka dari itu banyak pedagang (*manager*) dari beberapa perusahaan yang melakukan pengalihan impor batu bara ke negara lainnya contohnya adalah Rusia dan Indonesia. Menimbang Tiongkok merupakan sasaran terbesar dalam kegiatan ekspornya maka dengan adanya pembatasan impor batu bara yang dilakukan oleh Tiongkok ini pastinya telah memberikan dampak secara cukup signifikan kepada Australia menimbang Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki *Power* yang cukup besar dalam hal perpolitikan terlebih lagi dalam hal perekonomian dunia di mana kekuatan struktural yang dimiliki oleh Tiongkok ini sangat kuat pengaruhnya terhadap banyak negara. Adapun Susan Strange (1988: 25) sendiri mendefinisikan kekuatan struktural adalah suatu kekuatan "untuk memutuskan bagaimana hal - hal yang harus dilakukan dan kekuatan untuk membentuk kerangka kerja di mana negara dapat saling berhubungan, seperti berhubungan dengan orang, ataupun berhubungan dengan perusahaan - perusahaan".

## **B. Rumusan Masalah**

Apa faktor yang mempengaruhi kebijakan Tiongkok menghentikan kegiatan Impor Batu Bara Australia ke Tiongkok pada tahun 2018-2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi upaya kebijakan Tiongkok menghentikan kegiatan impor batu bara Australia pada tahun 2018-2020.
- b. Mengetahui secara detail bagaimana Tiongkok menghambat pengimporan batu bara dari Australia.

## **D. Signifikansi**

Isu yang diangkat dalam penelitian ini bukanlah suatu itu yang baru. Seperti yang kita tahu bahwa sebuah negara itu sama saja halnya dengan seorang manusia. Tidak ada negara yang bisa hidup sendiri dengan kata lain tidak ada negara tercukupi tanpa adanya negara lain. Setiap negara akan terus berkembang jika saling menjalin hubungan baik seperti bekerja sama dengan negara-negara lain. Dalam kasus ini kita dapat melihat bahwasannya kedua aktor yang dibahas di dalam penelitian ini, yaitu Australia dan Tiongkok pada dasarnya merupakan negara – negara yang saling membutuhkan dan menguntungkan satu sama lain.

Problematika yang diangkat di dalam isu ini sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut karena hipotesis sementara penulis beranggapan bahwa akar dari permasalahan ini bukan hanya dari satu faktor saja. Tidak sederhana alasan Tiongkok yang sedang berupaya untuk mengembangkan batu bara domestiknya, namun dibalik itu penulis beranggapan bahwa banyak faktor lainnya yang mempengaruhi seperti politik salah satunya. Karena pada dasarnya sebuah negara tidak akan jauh-jauh dari perpolitikan walaupun tidak semua hal selalu dilandasi dengan politik.

#### **E. Cakupan Penelitian**

Di dalam penelitian ini topik atau isu yang diangkat oleh penulis adalah mengenai kasus kebijakan Tiongkok mengenai pemberhentian atau penghambatan impor batu bara Australia ke Tiongkok. Penelitian ini mengambil jangka waktu sejak 2018 di mana isu ini mulai muncul dan peneliti mencoba untuk mengikuti perkembangannya hingga 2020. Penghambatan impor batu bara yang dilakukan oleh Tiongkok ini sedikit banyak telah memberikan dampak pada Australia. Sehingga di dalam penelitian ini akan difokuskan pada kedua negara ini saja, yaitu Australia dan Tiongkok.

Dengan demikian penelitian ini mencoba untuk fokus terhadap faktor yang menjadi penyebab dikeluarkannya kebijakan Tiongkok mengenai impor batu bara Australia ke Tiongkok yang dimulai sejak Februari 2019 lalu hingga saat ini.

## F. Tinjauan Pustaka

Untuk saat ini, belum banyak tulisan atau literatur ilmiah yang telah membahas mengenai konflik penghentian impor batu bara Australia ke Tiongkok secara spesifik. Namun di sini penulis menemukan beberapa tulisan ilmiah yang akan digunakan sebagai tulisan pendukung yang berisi beberapa informasi tambahan yang dapat menunjang dan melengkapi penelitian ini agar lebih baik lagi.

Perdagangan Bilateral yang terjalin antara Australia dan Tiongkok telah terbentuk sejak Hubungan kedua negara tersebut terjalin yang dimulai pada tahun 1972 dan terus mengalami peningkatan. Pada awalnya di tahun 1970-1980an volume perdagangan meningkat dari US \$ 1,14 miliar di tahun 1979 menjadi US \$ 1,55 miliar di tahun 1989 dan hal ini terus-menerus meningkat hingga saat ini. Sampai pada tahun 2006, volume perdagangan mencapai US \$ 34,65 miliar, di mana US \$ 15,41 miliar berasal dari ekspor Australia ke Tiongkok, menjadikan Tiongkok pasar terbesar kedua untuk ekspor Australia, mengikuti Jepang. Pada tahun yang sama, Australia mencatat impor senilai US \$ 19,24 miliar dari Tiongkok, menjadikan Tiongkok sumber impor terbesar bagi Australia. Dalam tulisannya, Dawei Cheng (2008) meneliti mengenai perkembangan hubungan kerjasama perdagangan antara Australia dan Tiongkok dengan melakukan perbandingan secara global dalam dunia ekspor-impor.

Penelitian ini menemukan bahwa perdagangan yang terjalin antara Tiongkok dan Australia mencakup produk industri, sumber daya mineral, dan barang dan jasa pertanian. Produk-produk yang diekspor oleh Tiongkok

ke Australia sebagian besar merupakan barang-barang industri, sementara komoditas utama yang diekspor oleh Australia ke Tiongkok adalah produk pertanian dan sumber daya mineral. Hal ini menunjukkan bahwa kedua negara tersebut saling melengkapi dan menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam kesimpulannya, penulis menarik salah satu kesimpulan yang mengatakan bahwa perdagangan antara Australia dan Tiongkok ini didasarkan pada perbedaan dalam faktor *endowment* mereka, dan kesimpulan yang berhasil ditarik untuk negosiasi atas perjanjian perdagangan bebas berlangsung untuk kepentingan kedua belah pihak (Cheng, 2008, p.34).

Pada akhirnya, hubungan kerja sama dagang antara Australia dengan Tiongkok semakin menguat ditandai dengan telah adanya Perjanjian Perdagangan Bebas Tiongkok-Australia (ChAFTA) secara resmi yang ditandatangani pada 17 Juni 2015 dan mulai berlaku pada 20 Desember 2015. ChAFTA sendiri adalah FTA keempat belas Tiongkok dan FTA pertama dengan ekonomi utama. ChAFTA juga merupakan salah satu FTA dengan tingkat liberalisasi perdagangan dan investasi tertinggi. Berdasarkan perjanjian tersebut, 85,4% dari barang yang diperdagangkan antara kedua belah pihak akan memotong tarif ke nol segera. Sekitar 97% dari Ekspor Australia ke Tiongkok dan 100% ekspor Tiongkok ke Australia akan bebas tarif mengikuti garis waktu yang dirancang secara bertahap.

Di dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Hongjin Xiang, Yanxiang Kuang, dan Chenhua Li (2016) mengatakan bahwa pada saat itu Cina merupakan produsen, konsumen, dan importir batu bara terbesar di dunia,

dan Australia adalah salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Dengan mempertimbangkan posisi penting kedua negara dalam industri batu bara global, tulisan tersebut juga berpendapat adanya perkiraan bahwa ChAFTA akan secara signifikan mempengaruhi produksi, perdagangan, dan konsumsi batu bara global. Dengan adanya perjanjian ChAFTA ini secara tidak langsung telah memberikan efek secara global karena berkat perjanjian ini ekspor batu bara Australia ke negara lain selain Tiongkok akan menurun. Begitupun juga sebaliknya ekspor batu bara dari negara lain selain Australia yang masuk ke Tiongkok akan diturunkan jumlahnya. Dengan begitu Tiongkok merupakan negara utama yang dituju Australia untuk melakukan ekspor batu baranya dalam skala yang tinggi.

Melihat fakta-fakta yang ada, terlihat bahwa Australia merupakan salah satu negara pengekspor batu bara terbesar di dunia. Sebenarnya selain batu bara, Australia memiliki satu komoditas lagi untuk diekspor yaitu bijih besi dan diketahui bahwa pada tahun 2011 pendapatan dari ekspor batu bara berada di bawah setelah pendapatan bijih besi yang merupakan pendapatan ekspor terbesar Australia pada saat itu. Namun pada akhirnya menurut Afees A. Salisua,b dan Idris A. Adediran (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pada tahun 2018, batu bara naik menjadi komoditas ekspor dengan pendapatan tertinggi di tahun 2018, dengan menyumbang \$ 66 miliar dalam pendapatan ekspor, didukung oleh harga yang membaik dan permintaan yang tinggi dari pasar Asia yang besar. Negara yang menjadi fokus juga di antara eksportir batu bara terkemuka di dunia dan pemasok utama ke Cina - importir batu bara terbesar di dunia. Secara keseluruhan,

penelitian ini membahas mengenai kondisi komoditas ekspor yang ada di Australia yaitu bijih besi dan batu bara. Penelitian ini telah cukup detail dalam membahas bagaimana kedua komoditas terbesar yang dimiliki oleh Australia ini dapat melindungi pendapatan negaranya tersebut. Meskipun pada penelitian tersebut lebih mendalam dalam membahas komoditas bijih besi, tetapi penelitian ini cukup membantu penulis dalam melengkapi informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi tulisan ilmiah ini.

Namun di sisi lain seperti yang kita ketahui bahwa selain importir batu bara terbesar, Tiongkok juga merupakan eksportir batu bara. Seperti yang terdapat dalam sebuah penelitian yang diteliti oleh Jianliang Wang, Lianyong Feng, Gail E. Tverberg (2013), supply Tiongkok untuk komoditas batu bara sendiri bisa mencapai 76,5 % dan sekitar 68,0% dari konsumsi energinya pada 2010 (Biro Statistik Nasional China (NBSC), 2011), menjadikan batu bara jauh lebih penting daripada minyak, gas, dan sumber energi lainnya. Penelitian ini secara general membahas mengenai bagaimana kondisi batu bara Tiongkok di masa depan termasuk produksi, permintaan konsumen maupun impor.

Tiongkok tidak akan bisa lepas dari salah satu sumber daya yang tidak terbaharukan ini (batu bara) oleh karena itulah Tiongkok terus-menerus melakukan impor batu bara meski negaranya sendiri adalah penghasil batu bara yang cukup besar. Hal ini dikarenakan bahwa konsuminya yang sangat tinggi. Namun di dalam penelitian yang ditulis oleh Xu Tang, Yi Jin, Benjamin C. McLellan, Jianliang Wang, dan Shiqun Li (2018) mengatakan bahwa pada dasarnya Tiongkok pernah mencoba untuk menekan konsumsi



batu baranya dikarenakan isu lingkungan yang ada namun pada akhirnya tidak berhasil. Faktanya, Cina telah secara konsisten berusaha membatasi konsumsi batu bara, terutama selama dekade terakhir selama Rencana Lima Tahun ke-11 (2006-2010) dan Rencana Lima Tahun ke-12 (2011-2015). Namun, ini tidak selalu berhasil dalam praktiknya, terutama selama periode 2006-2010. Menurut Rencana Lima Tahun ke-11 resmi Cina (2006-2010), konsumsi batu bara diperkirakan 2,56 Gt pada 2010. Namun, konsumsi batu bara aktual adalah 3,12 Gt, atau 22% lebih tinggi dari yang diharapkan (Biro Statistik Nasional China, 2015).

Tulisan yang ditulis oleh Dawei Cheng (2018), menjadi acuan dalam penelitian ini untuk mengetahui awal mula perjanjian dan kerja sama yang terjalin di antara Tiongkok dan juga Australia. Pada tulisan tersebut menjelaskan perkembangan antar kedua negara semenjak menjalin perjanjian. Dan penjelasan mengenai hubungan dagang ini dijelaskan secara lebih spesifik oleh Hongjin Xiang, Yanxiang Kuang, dan Chenhua Li (2016) di dalam tulisannya yaitu mengenai ChAFTA. Apa perubahan yang terjadi setelah adanya ChAFTA dan dampak perjanjian ini secara lebih umum terhadap dunia global. Pada dasarnya Cheng (2018) memiliki kesinambungan dengan Hongjin Xiang dan kawan - kawan. Dengan adanya kedua literatur ini diharapkan dapat menjadi acuan penulis dalam melengkapi apakah dengan adanya penghentian impor ini memiliki pengaruh terhadap perjanjian yang ada.

Tulisan yang ditulis oleh Afees A. Salisua,b dan Idris A. Adediran (2019) pun telah menjadi dasar penelitian ini untuk mengetahui seberapa

pentingnya komoditas batu bara di Australia. Sedangkan tulisan Jianliang Wang, Lianyong Feng, Gail E. Tverberg (2013) membahas mengenai pentingnya komoditas batu bara bagi Tiongkok. Sehingga harapan penulis adalah dapat melengkapi penelitian sebelumnya yang akan mencoba membahas mengenai apa yang terjadi ketika Australia kehilangan Tiongkok sebagai pasar besar ekspor komoditas batu baranya tersebut dan mengapa Tiongkok memutuskan untuk menghentikan impor batu bara Australia di saat Australia adalah eksportir terbesar bagi Tiongkok. Dan penelitian Xu Tang, Yi Jin, Benjamin C. McLellan, Jianliang Wang, dan Shiqun Li (2018), dimaksudkan penulis sebagai penunjang untuk literatur lainnya yang membahas mengenai pentingnya batu bara bagi Tiongkok karena konsumsinya yang relatif tinggi. Xu Tang, Yi Jin, Benjamin C. McLellan, Jianliang Wang, dan Shiqun Li (2018) mencoba meneliti mengenai naik turunnya skala kadar kebutuhan Tiongkok dalam mengkonsumsi batu bara.

Dengan demikian keseluruhan tinjauan pustaka ini telah menarik perhatian penulis untuk menjadikan tulisan – tulisan tersebut untuk melanjutkan penelitian yang membahas mengenai dampak yang dialami oleh Australia setelah Tiongkok menghentikan penerimaan impor batu bara dari Australia. Mencoba untuk mengetahui apa dasar yang paling utama dalam penghentian ekspor ini dikarenakan seperti yang diketahui bahwa sebenarnya kegiatan ekspor batu bara Australia ke Tiongkok ini cukup menguntungkan bagi keduanya.

## G. Landasan Teori/Konsep/Model

Penelitian ini akan membenarkan teori Realisme Defensif yang ditulis oleh Kenneth Waltz dan Realisme Ofensif yang ditulis oleh John H Mearsheimer yang merupakan cabang dari Neorealisme yang pertama kali dikemukakan oleh Kenneth Waltz dalam tulisannya yang berjudul *Theory of International Politics*. Neorealisme adalah salah satu bagian dari Teori Realisme yang secara garis besar percaya bahwa dunia internasional berada di dalam suatu struktur/ sistem yang anarki. Kaum realisme cenderung memandang kebijakan luar negeri sebagai salah satu faktor yang sangat penting bagi kelangsungan negaranya, karena secara tidak langsung hal tersebut dapat berdampak pada keamanan dan kelangsungan hidup negara. Machiavelli berpendapat bahwa tata negara termasuk pengakuan di dalam politik internasional, pembuat kebijakan tidak dapat bergantung pada siapapun kecuali dirinya sendirilah yang sangat menentukan keberhasilan negara. Dalam hal ini, timbul kemungkinan hipotesis oleh penulis yang berpendapat bahwa Tiongkok mengambil tindakan penghentian batu bara ini sebagai bentuk kecaman dan upaya dalam mempertahankan kepentingannya terhadap kejadian 5G Huawei di Australia. Di dalam buku yang ditulis oleh (Scott Burchill, 2005) yang berjudul *Theories of International Relations*, Waltz mengatakan bahwa Politik internasional terdiri dari beberapa unit serupa yang memiliki aktivitas yang hampir sama satu dengan yang lainnya yang berarti nasib dari unit tersebut ditentukan oleh takdir dan kemampuan yang mereka miliki.

Neorealisme mencoba menggabungkan beberapa faktor untuk menjelaskan kebijakan luar negeri tertentu dan menghasilkan implikasi yang berbeda tentang dinamika politik antar negara selain itu teori ini juga berfokus pada efek struktur pada kebijakan luar negeri dengan asumsi yang kontras mengenai perilaku khas sebuah negara. Dari realisasi ini lahir dua sub teoritis baru, yang masing-masing dibangun di atas wawasan dasar Neorealisme. Sesuai dengan yang telah dijelaskan penulis di atas, Neorealisme pertama kali hadir dengan pemikiran Waltz dengan pemahaman Realisme Defensif di dalam bukunya yang berjudul *Theory of International Politics* (1979), Waltz berpendapat bahwa Realisme Defensif lebih berfokus pada upaya suatu negara untuk mengejar kekuatan yang seimbang dengan negara lawan di dalam dunia yang anarkis daripada memaksimalkan kekuatannya. Di dalam kondisi seperti ini, negara sangat diharapkan untuk dapat menemukan cara membela diri tanpa mengancam orang lain, atau dapat menandakan niat damai mereka yang mengakibatkan potensi perdamaian lebih terbangun di dalam sistem internasional daripada yang diperkirakan para tokoh realis sebelumnya. Lalu setelah itu Mearsheimer hadir masih dengan prinsip dasar Neorealis membawa pemikiran baru yang sedikit berbeda dengan Waltz yaitu Realisme Ofensif yang dituliskan pada tulisannya yang berjudul *The Tragedy of Great Power Politics* (2001). Mearsheimer lebih berfokus pada bagaimana negara dengan kekuatan besar berperilaku satu sama lain dan menekankan bahwa negara hegemon seperti itu cenderung mencari peluang untuk mendapatkan kekuasaan. Realisme Ofensif berasumsi bahwa perilaku negara dibentuk

oleh sistem internasional. Faktor struktural seperti anarki dan distribusi kekuasaan adalah yang paling penting untuk menjelaskan politik internasional (Mearsheimer J. J., 2001).

Di dalam kasus yang dibahas dalam penelitian ini penulis akan mencoba untuk membahas bagaimana sebuah kebijakan dipengaruhi oleh pemikiran para aktor petinggi negara yang memiliki ideologi yang beraneka ragam. Seperti halnya seorang manusia, setiap negara juga memiliki keinginan untuk memiliki kendali atas negara-negara lain. Seperti yang telah dipaparkan oleh penulis pada halaman sebelumnya, sebelum kebijakan ini muncul ada sebuah kejadian yang menarik perhatian penulis yaitu tragedi 5G Huawei Tiongkok yang di-*banned* atau tidak diperbolehkan masuk ke Australia. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu hubungan antara Tiongkok dan Australia ini memanas. Di dalam teorinya, kepentingan nasional merupakan elemen utama di dalam teori ini. Di dalam pandangan kaum realis, salah satu upaya sebuah negara untuk menghadapi tantangan dunia luar seperti perbedaan politik dan semacamnya, pada akhirnya akan diselesaikan dengan memanfaatkan otoritas para pemimpin negara dengan menetapkan sebuah kebijakan untuk kedua negara. Namun untuk menjabarkannya lebih dalam lagi, Waltz mengatakan bahwa untuk mencapai kepentingannya secara struktural negara dihadapkan dengan dua pilihan yaitu *Bandwagoning* dan *Balancing* sedangkan Mearsheimer pun menawarkan 2 pilihan yaitu *Balancing* (sama seperti Waltz) dan *Buck Passing*.

Dalam studi kasus yang diangkat di dalam tulisan ini, penulis beranggapan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Tiongkok secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian Australia. Dengan adanya perjanjian ChAFTA yang diresmikan pada 2015 lalu, membuat Australia mengurangi persentase ekspor batu bara ke negara lain selain Tiongkok yang membuat Tiongkok menjadi pasar utama bagi Australia. Sehingga ketika Tiongkok memutuskan untuk tidak melanjutkan impor batu baranya terhadap Australia, maka Australia akan kehilangan pasar utamanya dan membuat perekonomian Australia terganggu karena seperti yang kita ketahui bahwa salah satu pendapatan terbesar negara Australia adalah dari kegiatan ekspor impornya yang mana salah satu barang ekspor terbanyaknya setelah bijih besi adalah batu bara. Hal itulah yang digunakan oleh Tiongkok sebagai senjata untuk mempertahankan kepentingan negaranya yang salah satunya dalam hal ini adalah perizinan atas pengembangan 5G Huawei.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Di mana metode tersebut dilakukan dengan studi kasus serta menggunakan teori untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah yang ada di dalam penelitian. Pendekatan kualitatif menurut Corbin dan Strauss (2015:5) merupakan bentuk penelitian dimana peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis

data menjadi bagian dari proses penelitian sebagai partisipan bersama informan yang memberikan data.

## **2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah negara yaitu Tiongkok dan juga Australia yang mana penulis ingin melakukan analisis mengenai faktor kebijakan Tiongkok yang melakukan penghambatan pengimporan batu bara terhadap Australia pada tahun 2018-2020. Dengan adanya ketegangan hubungan antara Tiongkok dan Australia dikarenakan kasus banned 5G Huawei yang dilakukan oleh Australia, apakah menjadi faktor utama dalam kebijakan Tiongkok mengenai penghentian ekspor batu bara Australia ke Tiongkok.

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data, penulis akan mencari data melalui studi literatur dari berbagai sumber baik melalui buku, google books, jurnal, maupun website-website resmi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **4. Proses Penelitian**

Pada tahap ini akan dilakukan secara kualitatif. Setelah melakukan pengumpulan data maka penulis akan memproses data-data tersebut mulai dari membagi sub-topik maupun memilah data-data yang akan digunakan. Permasalahan akan diilustrasikan melalui pembagian sub-topik yang telah dibuat oleh penulis agar dalam proses menganalisis permasalahan dapat lebih detail. Lalu, dalam setiap tulisan pada sub topik tersebut akan lebih dikerucutkan lagi sehingga pada akhirnya memudahkan penulis dalam

melakukan analisa melalui data-data yang telah ditemukan sehingga dapat memunculkan hasil dari analisa terkait kasus dalam penelitian.

## BAB II

### OVERVIEW

Tiongkok dan Australia sejatinya telah menjalin hubungan baik kurang lebih selama 40 tahun silam tepatnya pada tahun 1972. Hubungan tersebut dijalin berdasarkan beberapa faktor seperti kepentingan bersama pada beberapa bidang pada khususnya di dalam bidang ekonomi. Hubungan tersebut semakin membaik dari tahun ke tahun hingga akhirnya pada tahun 2007 Tiongkok resmi menjadi pasar ekspor terbesar bagi Australia. Liu dan Hao (2014) di dalam tulisannya yang berjudul *Australia in China's Grand Strategy* menerangkan bahwa “79% anggota parlemen Australia mengklaim bahwa perjanjian perdagangan bebas (FTA) akan menjadi kepentingan Australia. Lebih dari 65% narasumber menyatakan bahwa FTA dengan China akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan standar hidup Australia. Sebanyak 85% mengatakan bahwa komunitas bisnis di daerah pemilihan mereka memandang 'kebangkitan China' sebagai peluang yang signifikan. Sekitar 75% anggota parlemen merasa bahwa meningkatkan ekspor Australia ke China akan "sangat berpengaruh", dan 20% merasa bahwa hal itu akan "cukup berpengaruh" dalam menentukan karakter masa depan dari hubungan Australia-China.”



Seperti yang telah dituliskan pada bab sebelumnya, kedekatan hubungan antara Tiongkok dan Australia melahirkan sebuah perjanjian perdagangan yang dikenal dengan sebutan China Australia Free Trade Agreement atau yang biasa disebut dengan ChAFTA pada 20 Desember 2015 lalu.

Dilihat dari laman resmi Pemerintahan Australia, ditulis beberapa ketentuan dari perjanjian ChAFTA adalah sebagai berikut :

- Bijih besi, emas, minyak petroleum mentah dan gas alam cair: ChAFTA mengunci tarif nol yang ada pada ekspor utama ini, memberikan kepastian yang lebih besar bagi eksportir Australia;
- Batubara kokas: tarif 3 persen dihapuskan seluruhnya pada 20 Desember 2015;
- Batubara termal: tarif 6 persen dihapuskan seluruhnya pada 1 Januari 2017;
- Tembaga dan paduan halus (tidak ditempa), aluminium oksida (alumina), seng yang tidak ditempa, aluminium yang tidak ditempa, nikel dan titanium dioksida yang tidak ditempa: tarif hingga 10 persen dihapuskan, banyak segera pada tanggal 20 Desember 2015;
- Obat-obatan, termasuk vitamin dan produk kesehatan: penghapusan tarif hingga 10 persen, baik pada 20 Desember 2015 atau secara bertahap selambat-lambatnya 1 Januari 2019;

- Suku cadang dan mesin mobil, produk plastik, opal, dan batu mulia lainnya: penghapusan tarif untuk ini dan produk manufaktur lainnya selambat-lambatnya 1 Januari 2019.

Dengan adanya perjanjian ChAFTA ini telah menandai semakin berkembang baiknya hubungan yang terjalin di antara Australia dan Tiongkok karena perjanjian ini dibangun di atas hubungan komersial Australia yang besar dan sukses dengan Tiongkok, dengan mengamankan pasar dan memberikan akses yang lebih baik kepada warga Australia ke Tiongkok di berbagai kunci kepentingan bisnis Australia, termasuk barang, jasa dan investasi. Selain itu, dibentuknya sebuah perjanjian dagang seperti ini adalah salah satu kunci untuk semakin mendorong bertambah eratnya hubungan kedua negara yang telah terjalin karena terikat oleh suatu perjanjian yang bersifat saling membutuhkan dan menguntungkan antara satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya, pada sub bab berikutnya penulis akan mencoba untuk membahas mengenai terhambatnya ekspor batu bara Australia ke Tiongkok akibat kebijakan *banned* batu bara Australia yang dilakukan oleh Tiongkok termasuk dampak yang terjadi setelah insiden tersebut. Selanjutnya, penulis juga akan membahas mengenai kronologis kasus *banned* 5G Huawei yang dilakukan oleh Australia sebagai dasar untuk melengkapi penelitian ini.

## 2. 1 Proses Pemberhentian Ekspor Batu Bara Australia ke Tiongkok

Kebijakan Tiongkok mengenai penghambatan impor batu bara Australia yang masuk ke Tiongkok cukup menjadi sorotan media. Pasalnya, Tiongkok merupakan pasar impor terbesar bagi negara Kangguru tersebut dengan batu bara yang menjadi komoditas utamanya yang menghasilkan pendapatan senilai \$ 64 miliar, dan Tiongkok merupakan negara importir batubara terbesar (278 juta ton, 23,4% dari impor dunia pada tahun 2012) di dunia, dan telah mengkonsumsi sekitar seperempat dari total pengiriman batu bara dari Australia. Kegiatan ekspor impor antara Tiongkok dan Australia ini telah berlangsung sejak lama, tetapi pada Februari 2019 Tiongkok dengan otoritas yang dia miliki telah memberlakukan larangan impor batu bara yang dikirim dari Australia. Tetapi karena Beijing tidak terang-terangan mempublikasikan pelarangan ini, membuat penentuan tanggal mulai diberlakukannya larangan ini menjadi kurang jelas. Pemerintah telah secara langsung memerintahkan beberapa utilitasnya untuk menghentikan pembelian batu bara yang diimpor dari Australia. Sementara itu, pembangkit listrik dan baja juga diperintahkan untuk berhenti menggunakan batu bara Australia. Isu ini cukup disorot media, seorang pejabat dari Dalian Port Group mengatakan kepada Reuters bahwa Bea Cukai di pelabuhan utara Tiongkok Dalian telah memberlakukan pelarangan impor batu bara Australia dan akan membatasi impor batu bara secara keseluruhan dari seluruh sumber untuk tahun 2019 sebesar 12 juta ton.

Sebelum pelarangan tersebut benar-benar dilakukan, para eksportir Australia mengalami perubahan waktu yang cukup signifikan dalam mengirimkan batu bara mereka ke Tiongkok melalui pelabuhan Dalian. Jika biasanya pengiriman dilakukan hanya memakan waktu selama selang kurang lebih 25 hari, namun sejak awal tahun 2019 kegiatan tersebut memakan waktu selama 40 hari. Tidak hanya di pelabuhan Dalian, adapun beberapa pelabuhan lainnya yang selalu diawasi oleh petugas bea cukai selain Dalian adalah termasuk pelabuhan Bayuquan, Panjin, Dandong dan Beiliang. Akibatnya karena kebijakan ini belum diketahui pasti kapan akan berakhir, para importir yang berada di Tiongkok banyak yang memutuskan untuk mengimpor batu bara dari negara lainnya. Beberapa pelaut kini terjebak di kapal selama beberapa bulan. M V Jag Anand berbendera India tidak diizinkan untuk membongkar muatan batubara kokas Australia di pelabuhan Tiongkok pada bulan Juni. Saat ini lebih dari 70 terdampar di pantai lepas dan diketahui dari 7,8 juta ton batu bara yang terjebak di pantai lepas Tiongkok, 2,6 juta ton adalah batu bara termal dan 5,2 juta ton adalah batu bara metalurgi. Yang mana tahun lalu Tiongkok mengimpor \$ 4 miliar batubara termal Australia untuk digunakan di pembangkit listrik dan hampir \$ 10 miliar batubara metalurgi, yang digunakan dalam tanur sembur untuk membuat baja.

Pada awalnya, pemerintah Australia menentang keras berita mengenai isu ini yang diterbitkan oleh media, namun pada akhirnya salah satu portal media Tiongkok yaitu The Global Times China mengkonfirmasi hal tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh Tiongkok

dengan alasan bahwa larangan tersebut adalah tindakan hukuman ekonomi, dan kemungkinan akan terus berlanjut. Namun mengingat kebutuhan pasokan batu bara Tiongkok yang tidak sedikit, negara tirai bambu tersebut tetap melakukan impor batu bara untuk mengganti kebutuhan batu bara dari Australia yang salah satunya berasal dari Indonesia dan Rusia. Geng Shuang, juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok, mengatakan kepada wartawan Reuters bahwa pihak bea cukai sedang memeriksa dan menguji impor batu bara untuk keamanan dan kualitas. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk lebih melindungi hak-hak hukum dan kepentingan importir China dan untuk melindungi lingkungan dan semua langkah tersebut sepenuhnya adalah normal. Pada akhir tahun 2020, Pemerintah Tiongkok telah menolak permohonan dari industri bajanya sendiri untuk mencabut larangan kargo batu bara Australia, membuat puluhan kapal yang membawa 8 juta ton komoditas itu terdampar di laut. Terdamparnya kapal – kapal tersebut di lautan membuat adanya kemacetan kapal di pantai lepas selama berbulan – bulan. Permohonan tersebut bermaksud untuk mengurangi kemacetan yang terjadi dan kapal yang dilepaskan adalah kapal yang melakukan pengiriman sebelum pelarangan impor batu bara Australia ini terjadi, sementara itu untuk kapal – kapal yang dikirimkan setelah kebijakan itu tetap ditahan karena peraturan yang sudah berlaku. Namun sayangnya hal tersebut tidak segera mendapat respon dari pemerintah Tiongkok.

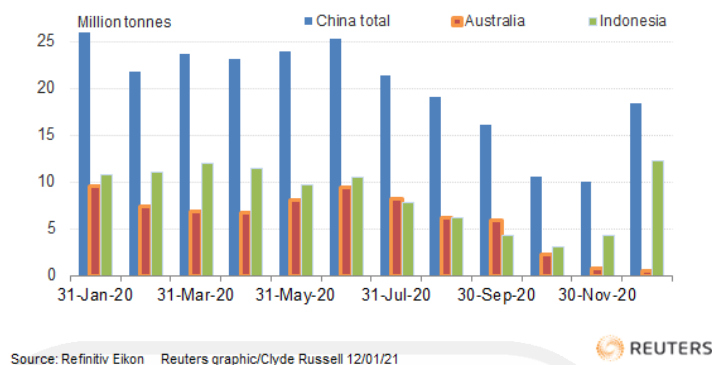
Selain bertambah memanasnya hubungan diplomatik Australia dengan Tiongkok atas adanya kebijakan ini, hal ini juga menimbulkan

sedikit kerugian yang harus ditanggung oleh Tiongkok, salah satunya adalah Wood Mackenzie mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok bersedia menanggung kerugian ekonomi dalam industri baja yang membayar lebih mahal untuk mengamankan batu bara alternatif serta menghadapi kenaikan harga bijih besi yang melonjak dua kali lipat dalam 12 bulan menjadi lebih dari \$ 160 per ton. Selain itu, portal media Bloomberg menginformasikan bahwa impor batu bara Tiongkok dari semua negara melonjak ke rekor tertinggi pada bulan Desember 2020, mengangkat total tahunan batu bara di atas 300 juta ton ke level tertinggi sejak 2013.

Bagi Australia sendiri dengan adanya pemberitaan ini, selain adanya dollar tumbling dikarenakan dolar Australia sempat jatuh lebih dari 1% ke level US70,86 karena mengingat batu bara merupakan salah satu akomodasi ekspor penyumbang pendapatan terbesar bagi Australia. Dalam beberapa tahun terakhir juga, Australia telah tergeser posisinya sebagai pemasok batu bara utama bagi Tiongkok dikarenakan persentase eksportnya yang hampir mencapai angka nol. Posisi itu sekarang telah diduduki oleh Indonesia. Indonesia dan Australia merupakan dua negara yang cukup mendominasi perdagangan batu bara dalam lintas laut global, dengan Asia Tenggara yang menduduki peringkat teratas dalam batubara termal, yang mana batu bara jenis ini biasanya digunakan untuk bahan pembangkit listrik, sedangkan Australia menduduki posisi sebagai pengirim batubara kokas terbesar, yang biasanya digunakan untuk membuat baja, dan menduduki posisi nomor dua untuk batubara termal.

## CHINA SEABORNE COAL IMPORTS

Refinitiv data for total seaborne imports vs from Australia and Indonesia



Pada diagram tersebut terlihat bahwa batu bara Australia mengalami pergeseran yang cukup signifikan di tahun 2020 terakhir. Dikutip dari Mining.com “Impor China dari Australia hanya 447.523 ton, terendah sejak Refinitiv mulai mengumpulkan pelacakan kapal dan data pelabuhan pada Januari 2015, dan turun drastis dari tertinggi 2020 sebesar 9,64 juta ton pada Juni. Bahkan volume sedang dari Australia mungkin tidak tersedia untuk pengguna akhir karena data Refinitiv hanya mengukur kargo yang telah dikeluarkan, yang berarti kemungkinan pengiriman belum melewati bea cukai.”

### 2. 2 Banned 5G Huawei oleh Australia

Huawei merupakan salah satu penyedia alat telekomunikasi dan memiliki infrastruktur jaringan 5G yang cukup terkemuka di dunia. Pada tahun 2017 Huawei hampir melampaui Apple untuk menjadi merek smartphone terbesar kedua di dunia. Brand ini memiliki pusat yang berada di Shenzhen, Tiongkok. Walaupun begitu, Huawei menyediakan

produknya bukan hanya untuk dioperasikan di dalam negeri tapi juga ke dunia Internasional. Huawei berdiri pada tahun 1987 dan didirikan oleh Ren Zhengfei dengan merekrut lebih dari 180.000 karyawan. Huawei diyakini telah berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemimpin untuk mengembangkan dan menyebarkan program 5G di seluruh dunia. Tidak hanya mendominasi di Tiongkok, tetapi Huawei juga telah menjalin kemitraan dengan perusahaan telekomunikasi di seluruh Asia dan Eropa. Dengan peran Huawei yang semakin meningkat dalam menciptakan standar teknis untuk 5G, memicu banyaknya pertentangan dari negara - negara dunia Internasional.

Pelarangan jaringan telekomunikasi Huawei ini diperkasai oleh Amerika Serikat yang kemudian diikuti oleh Australia. Pada awalnya presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengeluarkan kebijakan untuk memberikan sanksi kepada Huawei agar tidak dapat melakukan kerja sama dengan seluruh perusahaan yang berada di dalam Amerika Serikat termasuk Google, Qualcomm, dan Intel. Dengan begitu membuat seluruh akses yang menggunakan aplikasi ataupun software yang berasal dari perusahaan tersebut ditiadakan. Hal itu membuat perusahaan telekomunikasi ini harus mengatur strategi smartphone dan pemasarannya.

Hal serupa juga dilakukan oleh Australia, di mana pada Agustus 2018 Australia mulai memutuskan untuk melakukan pelarangan terhadap Huawei. Sama halnya seperti Amerika Serikat dan negara lainnya, alasan utama pelarangan ini adalah kekhawatiran negara karena Huawei dianggap mengancam keamanan negara. Mereka menganggap bahwa Huawei bisa



jadi adalah mata-mata yang digunakan oleh Tiongkok untuk memata-matai negara lain. Media Reuters mengatakan bahwa Pemerintah federal Australia telah mengirimkan sebuah email yang mengatakan keterlibatan perusahaan mana pun "yang kemungkinan besar akan tunduk pada arahan di luar hukum dari pemerintah asing yang bertentangan dengan hukum Australia" menimbulkan terlalu banyak risiko. Meskipun dalam surat elektronik tersebut tidak menjelaskan secara langsung yang dimaksud adalah perusahaan telekomunikasi Tiongkok tersebut, tetapi pada akhirnya pernyataan tersebut memang ditujukan untuk Huawei. Selain itu Pemerintah Australia juga menegaskan bahwa "Meskipun kami sangat dilindungi oleh kontrol keamanan saat ini, namun jaringan baru dengan peningkatan kompleksitasnya, akan membuat perlindungan saat ini tidak efektif dalam 5G". Kekhawatirannya adalah telekomunikasi tersebut dapat secara diam-diam meretas data pribadi, mendapatkan akses ke perangkat apapun menggunakan sinyal. Pemerintah Tiongkok pun menyuarakannya dalam konferensi pers untuk menanggapi hal ini. Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada saat itu mendesak pemerintah Australia "untuk meninggalkan prasangka ideologis dan menyediakan lingkungan persaingan yang adil bagi perusahaan Tiongkok".

Hal tersebut telah dibantah oleh Huawei. Di laman resminya, Huawei mengatakan bahwa mereka merupakan perusahaan swasta, yang dimiliki sepenuhnya oleh karyawan. Tidak ada pihak ketiga yang memiliki saham di perusahaan, termasuk pemerintah Tiongkok. Mereka juga mengatakan bahwa hukum di Tiongkok tidak ada yang memberikan

wewenang kepada Pemerintah untuk memaksa perusahaan telekomunikasi untuk melakukan hal-hal yang akan membahayakan alat telekomunikasi negara dan merugikan pelanggannya. Meskipun begitu, para negara penentang Huawei ini termasuk Australia menyatakan bahwa di hukum di Tiongkok masih relatif tidak jelas atau abu – abu. Selain itu, ada fakta yang menarik mengenai beberapa pembesar Huawei. Ren Zhengfei yang mendirikan Huawei merupakan anggota korps teknik militer Tiongkok yang sekaligus merupakan mantan direktur Akademi Teknik Informasi Departemen Staf Umum Tentara Pembebasan Rakyat atau *People's Liberation Army* (PLA), yang lalu bekerja untuk perusahaan milik negara dan kemudian mendirikan Huawei pada 1987. Selain itu, mantan ketua Huawei yang bernama Sun Yafang pernah dikabarkan bekerja dengan Kementerian Keamanan Negara yang memungkinkan untuk memanfaatkan hal tersebut dalam urusan kesulitan keuangan. Kurangnya transparansi atas *background* atau latar belakang orang-orang yang membesarkan Huawei inilah yang telah memperdalam kecurigaan dari publik.

Perdebatan mengenai sengketa keterlibatan Huawei dalam industri telekomunikasi Australia telah berlangsung selama satu dekade. Larangan yang diterbitkan pada tahun 2018 lalu bukanlah hal yang pertama bagi perusahaan di Australia. Kasus terakhir yang disorot di Australia bulan lalu adalah tuduhan bahwa pelaku dunia maya Tiongkok tidak hanya meretas Universitas Nasional Australia yang merupakan salah satu Universitas terkemuka Australia, tetapi juga terus hadir dalam sistem TI

universitas selama kurang lebih tujuh bulan. Sebenarnya ketika Australia mencoba untuk menyikapi kejadian ini, Australia telah menyiapkan salah satu opsi yaitu untuk memulai pusat evaluasi keamanan dunia maya yang akan bertanggung jawab untuk memberikan penilaian berkelanjutan terhadap produk Huawei kepada pembuat kebijakan Australia dengan mengandalkan pendekatan pemerintah Inggris mengingat bahwa Australia merupakan negara persemakmuran Inggris. Opsi ini dibuat untuk dimaksudkan sebagai jalan tengah atas permasalahan tersebut. Mengingat keadaan hubungan Australia dan Tiongkok yang kurang bahagia, opsi ini dipandang sebagai salah satu tindakan aman oleh Australia. Namun sayangnya, opsi ini ternyata tidak berhasil. Pusat Keamanan Nasional Inggris mengatakan bahwa mereka "kurang yakin" dapat memberikan "jaminan teknis jangka panjang dengan cakupan dan kualitas yang memadai di sekitar Huawei di Inggris Raya" karena "penemuan berulang atas kekurangan kritis".

Dalam kasus Huawei pada tahun 2018 ini, meskipun hal tersebut hanya berbentuk sebuah kekhawatiran belaka dan faktanya semua tuduhan yang dijatuhkan pada Huawei tidak semuanya mendapatkan konfirmasi dan belum ada bukti nyata, namun pendorong utama di balik keputusan Australia tersebut adalah analisis yang cermat terhadap undang-undang intelijen nasional Tiongkok tahun 2017 yang menyatakan bahwa: "Organisasi dan warga negara harus, sesuai dengan hukum, mendukung, bekerja sama dengan, dan berkolaborasi dalam pekerjaan intelijen nasional dan menjaga kerahasiaan pekerjaan intelijen nasional yang mereka sadari."

Menurut negara – negara penentang Huawei termasuk Australia, adanya hukum ini adalah sesuatu yang cukup berbahaya dan dapat menjadi pedang bermata dua bagi Tiongkok karena hukum ini mewajibkan individu dan organisasi untuk terlibat dalam aktivitas intelijen mendukung pengumpulan intelijen tetapi dengan biaya yang jelas bagi perusahaan, reputasi mereka, dan akses berkelanjutan ke pasar internasional.

Setelah adanya peristiwa ini, adapun alasan utama Australia melakukan pelarangan ini menurut Uren & Cave (2018) yang pertama adalah permasalahan ini bukan merupakan permasalahan enteng dan keputusan yang dibuat bukan keputusan politis. Ada beberapa masalah dunia maya dan keamanan nasional yang memaksa dan tumpang tindih yang memaksa pemerintah Australia turun tangan. Seperti yang telah dicatat oleh Menteri Luar Negeri baru bernama Marise Payne, keputusan itu adalah tentang melindungi kepentingan Australia semata. Kedua, Undang-Undang Intelijen Nasional Tiongkok tahun 2017 adalah berita buruk bagi ambisi ekspansi internasional perusahaan Tiongkok. Ketika menimbang keterlibatan perusahaan asing dalam proyek infrastruktur penting, bagaimana bisa pembuat kebijakan dapat mengajukan argumen yang kredibel untuk mendukung perusahaan yang perilaku internasionalnya terikat oleh undang-undang keamanan domestik.

### BAB III

## ANALISIS FAKTOR KEBIJAKAN TIONGKOK MENGHENTIKAN KEGIATAN IMPOR BATU BARA AUSTRALIA - TIONGKOK TAHUN 2018 – 2020

Pada bab 3 ini penulis akan membahas mengenai analisis faktor yang mempengaruhi kebijakan Tiongkok dalam menerapkan pemberhentian impor batu bara Australia-Tiongkok yang dilihat menggunakan kacamata *Neorealism Theory* dari sudut pandang Realisme Ofensif dan Realisme Defensif yang ditulis oleh John Mearsheimer dan Kenneth Waltz yang merupakan sub teori dari Neorealisme. Adapun beberapa indikator dasar dalam Teori ini adalah sebagai berikut.

<b>Indikator</b>	<b>Realisme Ofensif by Mearsheimer</b>	<b>Realisme Defensif by Waltz</b>
Aktor utama pembuat keputusan	Negara	Negara
Penyebab negara memperebutkan kekuasaan	Struktur dalam sistem	Struktur dalam sistem
Tujuan Utama	Bagaimana bertahan hidup di dunia yang tidak ada jaminan untuk melindungi negara satu sama lain	Bagaimana bertahan hidup di dunia yang tidak ada jaminan untuk melindungi negara satu sama lain

Cara yang ditempuh	Memaksimalkan kepentingan dalam sistem	Mempertahankan kepentingan dalam sistem
Strategi dalam teori	Balancing & Back Passing	Balancing & Bandwagoning

Dengan menggunakan kedua sub teori ini diharapkan penulis dapat menganalisis menggunakan logika mengenai sifat dari suatu negara. Pembahasan secara keseluruhan dalam bab ini bersifat deskriptif, yang mana isi dari bab ini akan diulas oleh penulis menggunakan implementasi dari teori Realisme ofensif dan Realisme Defensif untuk membantu penulis dalam penelitian mengenai tujuan dan niat dari kebijakan suatu pihak sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang ditawarkan yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi kebijakan Tiongkok dalam menghentikan pasokan impor batu bara yang dikirim oleh Australia. Dengan demikian untuk menjabarkan analisis dalam bab ini penulis menjabarkannya menggunakan 3 elemen contoh kasus yang saling berkaitan. Yang pertama adalah kasus pengembangan jaringan 5G Huawei yang akan dianalisis menggunakan Realisme Ofensif dari Mearsheimer. Sedangkan kasus lainnya yaitu pemberhentian ekspor batu bara Australia ke Tiongkok dan juga Penyelidikan Wabah Covid-19 akan dianalisis menggunakan Teori Realisme Defensif yang ditulis oleh Waltz.

### **3.1 Model Realisme Ofensif dalam Memaksimalkan Kekuasaan Tiongkok untuk Menjadi Penguasa Tunggal dengan Pengembangan 5g Huawei**

Negara bukanlah satu-satunya aktor yang berada di dalam struktur internasional. Mearsheimer mengatakan di dalam bukunya yang berjudul *The Tragedy of Great Power Politics* (2001, pg 5) bahwa di dalam struktur internasional, negara *super power* memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan dalam bersengketa dengan negara lain. Struktur sistem internasional mendorong negara untuk mengejar hegemoni. Kekuasaan dapat diibaratkan seperti mata uang dalam politik kekuatan besar. Seperti halnya bagaimana pentingnya uang bagi ekonomi, seperti itu juga kekuasaan bagi hubungan internasional. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa negara dengan kekuatan besar menginginkan kekuasaan dan mengapa banyak negara yang berlomba untuk mendapatkannya.

Dalam Realisme Ofensif, untuk mempertahankan kepentingan yang terganggu oleh negara lain dapat diatasi dengan 2 strategi untuk menjaga keseimbangan kekuasaan tersebut. Yang pertama adalah *Balancing* dan yang kedua yaitu *Buck Passing*. Dengan *Balancing*, negara yang terancam menerima beban dapat menggunakan sumber daya yang besar untuk mencapai tujuannya kembali. Sedangkan *Buck Passing* adalah strategi yang dapat dilakukan ketika kepentingan terancam, negara hegemon dapat mencoba membuat negara lain memikul beban untuk menghalangi ataupun mengalahkan negara yang mengancam. Strategi-strategi tersebut adalah kunci dalam realisme ofensif yang digunakan negara untuk memaksimalkan kekuatannya.

Jika kita lihat lagi kebelakang mengingat status Tiongkok dan Amerika Serikat yang merupakan sesama negara *super power* masih terjat di situasi yang cukup pelik. Untuk mengejar ketertinggalannya dalam masa 3G dan 4G yang dominan dikuasai oleh Amerika Serikat pada jamannya, kesempatan ini dapat menjadi batu loncatan untuk Tiongkok menuju garis terdepan dalam persaingannya dengan Amerika Serikat. Maka dari itu melalui pengembangan Huawei ini dapat menjadi salah satu cara Tiongkok untuk memaksimalkan kekuasaannya dalam sistem.

Pada era global seperti sekarang ini, adanya perkembangan jaringan 5G akan sangat menguntungkan bagi penggunanya. Tidak hanya itu, 5G menimbulkan optimisme yang cukup besar bagi masyarakat internasional yang dipercaya dapat membantu pengembangan ekonomi di masa yang akan mendatang. Jaringan ini dikenal dengan kecepatan yang tinggi, latensi rendah dan *throughput* yang tinggi yang memungkinkan dapat mentransfer data dengan kecepatan tinggi daripada generasi sebelumnya yaitu 4G. Selain itu 5G juga diperkirakan akan memberikan keuntungan yang sangat besar terhadap ekonomi dunia serta membantu mempersiapkan inovasi baru dalam produktivitasnya. Huawei, sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi yang ada di Tiongkok telah siap untuk meluncur ke ranah global untuk menjadi pemimpin inovasi jaringan 5G dan siap membangun kemitraan baru di seluruh dunia. Mengingat banyaknya keunggulan yang dihasilkan oleh proyek ini membuat pemerintah Tiongkok sangat mendukung berjalannya proses ini. Tiongkok sendiri telah melakukan investasi yang cukup besar terhadap infrastruktur



yang diperlukan untuk mendukung jaringan 5G. Tiongkok nampaknya sudah cukup siap untuk menjadi pemimpin global dan pencetus dalam jaringan 5G. Sejatinya sebagai pemimpin awal, Tiongkok akan memperoleh manfaat dari mempromosikan ekosistem industri dan komersial yang dirancang untuk membangun jaringan 5G yang akan membawakan lebih banyak keuntungan untuk negara mereka termasuk meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya secara global.

Adapun beberapa manfaat dari terealisasikannya jaringan 5G ini adalah sebagai berikut :

- Dengan kecepatannya yang sangat tinggi, jaringan ini akan diperlukan di berbagai bidang seperti mobilitas, manufaktur bahkan bidang pertanian. Maka dapat diramalkan bahwasannya kota-kota maju akan cukup bergantung pada jaringan 5G ini;
- Jaringan ini dapat menyumbangkan dana yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian dunia serta mendukung produktivitas dan munculnya inovasi baru;
- Konektivitas yang tidak tertandingi yang akan disediakan oleh 5G merupakan bagian untuk mewujudkan potensi penuh dari teknologi "internet of things" (IoT) dan "*Artificial Intelligence*" (AI) di dunia nyata;
- 5G dapat mengaktifkan industri baru dan memberikan kontribusi pada bidang ekonomi digital yang dinamis;
- Di dalam dunia militer jaringan ini pun memberikan suatu hal yang cukup menjanjikan. Peningkatan kecepatan dan konektivitas 5G dapat

memfasilitasi transfusi data dan meningkatkan kesadaran situasional untuk meningkatkan komando dan kendali, serta memberikan keuntungan operasional yang signifikan di medan perang masa depan seperti misalnya memungkinkan komunikasi mesin ke mesin antara sensor, drone, atau bahkan kawan di medan perang, serta peningkatan interaksi manusia dengan mesin.

Menurut Mearsheimer, negara dapat bertahan hidup dalam sistem anarki dengan cara memaksimalkan kekuasaan mereka terhadap negara lain. Nasib masing-masing negara tergantung pada tanggapannya terhadap apa yang dilakukan negara lain, hal inilah yang menjadi alasan mengapa kita memiliki perlombaan senjata, persaingan dan peniruan di bidang inovasi teknologi militer. Oleh karena itulah, setelah melihat keunggulan serta keuntungan yang dijanjikan oleh jaringan 5G ini maka tidak heran bahwa pengembangan jaringan 5G sangat memiliki arti besar untuk Tiongkok. Namun ketika Tiongkok telah siap dengan segenap keyakinannya dalam memimpin pengembangan jaringan 5G ini, kenyataan berkata bahwa pengembangan ini harus dihadapkan oleh beberapa penolakan-penolakan oleh negara lain termasuk Amerika Serikat dan juga Australia.

Pada tanggal 6 Juli 2018, The Strategist menerbitkan sebuah tulisan yang ditulis oleh Greg Austin. Di dalam tulisan tersebut dia menerangkan bahwa konsensus pendapat ilmiah global tentang masalah “Kampanye melawan Huawei” menunjukkan bahwa orang-orang di Australia yang mengadvokasi larangan Huawei di jaringan 5G yang

meniru pendapat kepala intelijen AS yang diungkapkan pada Februari 2018 belum meninjau semua informasi dan perspektif yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya pelarangan Huawei yang diputuskan oleh pemerintah Australia belum menemukan alasan yang jelas. Bahkan ada isu yang mengatakan bahwa pemerintah Australia hanya mengikuti langkah yang diambil oleh Trump atas dasar kedekatan yang terjalin antara Australia dan Amerika Serikat saja, namun Australia melupakan bahwa Tiongkok juga memiliki posisi yang menguntungkan untuk Australia terutama dalam bidang perdagangan. Dengan dikeluarkannya larangan untuk mendukung perkembangan jaringan 5G yang di kembangkan oleh Huawei, mendapatkan respon yang cukup serius oleh pemerintah Tiongkok. Tepat pada Agustus 2018 lalu, Turnbull memasukan Huawei ke dalam daftar hitam dari jaringan 5G Australia dengan alasan keamanan, Tiongkok mengatakan bahwa hal tersebut termasuk tindakan diskriminasi Australia terhadap perusahaan Tiongkok. Tiongkok juga mewanti-wanti bahwa kasus ini akan berdampak ‘kurang baik’ kedepannya terhadap hubungan dagang antara Tiongkok dan Australia.

Hal tersebut terbukti dengan semakin memanasnya hubungan antara Tiongkok dan Australia setelah adanya pembatasan masuk impor batu bara dari Australia (yang berujung pada pelarangan) sebagai salah satu respon kekesalan pemerintah Tiongkok terhadap pelarangan Huawei yang dilakukan oleh Australia. Jika berkaca pada pandangan Neorealis, hal ini disebabkan karena aktor negara dimotivasi oleh kepentingan pribadi karena sedang merasakan yang dinamakan dengan dilema keamanan.

Mearsheimer juga menjelaskan mengenai dilema keamanan menurut John Herz dalam artikelnya yang terbit pada 1950 di jurnal *World Politics* (Mearsheimer J. H., 2001, p. 36), yang mengatakan bahwa setelah berjuang untuk mencapai keamanan, negara didorong untuk memperoleh banyak kekuatan untuk menghindari kekuatan negara lain. Namun, karena tidak adanya rasa aman yang sepenuhnya dalam dunia yang anarkis, maka perlombaan untuk memperoleh kekuatan kerap terjadi.

Pada kasus ini, perasaan tidak aman yang dialami oleh Tiongkok memaksa negara tersebut untuk bersaing ataupun melakukan upaya sejenisnya yang bertujuan untuk memaksimalkan kekuatannya di dalam sistem atau bahkan mendapat otoritas yang lebih besar untuk merasa lebih aman daripada sebelumnya. Tiongkok telah melakukan investasi yang cukup signifikan dalam upaya pembangunan infrastruktur digital jaringan serat optik yang lebih kuat yang mana hal ini merupakan salah satu hal yang penting untuk memfasilitasi penyebaran 5G dalam skala besar. Kelompok promosi IMT-2020 (5G) yang dibentuk oleh pemerintah Tiongkok pada tahun 2013 lalu pun telah mengkoordinasikan upaya antara lembaga negara dan pemangku kepentingan industri untuk mendukung penelitian dan pengembangan, serta pengujian dan standar untuk 5G (Huawei Technologies Co., Ltd., 2018). Pemerintah Tiongkok juga telah melakukan pendekatan proaktif dan terkoordinasi untuk manajemen spektrum dan realokasi, yang melibatkan pemangku kepentingan militer dan industri, untuk mempersiapkan penyebaran 5G yang meluas melalui perizinan dan dekonflikasi spektrum yang diperlukan. Biaya yang

dikeluarkan oleh Tiongkok pun untuk mendukung program ini bukan tergolong sedikit. Dalam mendukung pengembangan jaringan ini diperkirakan biaya yang dikeluarkan berjumlah ratusan miliar dolar di seluruh kombinasi pendanaan pemerintah dan investasi komersial. Pada tahun 2019, Tiongkok mempercepat upaya dalam 5G dan mendedikasikan 57 persen (atau sekitar \$ 146 miliar) dari \$ 256 miliar pengeluaran yang direncanakan untuk teknologi untuk 5G. Tiongkok juga meluncurkan sejumlah proyek untuk mengeksplorasi potensinya di berbagai industri, seperti transportasi pintar, internet industri, dan perawatan kesehatan. Untuk kerangka waktu 2020 hingga 2030, pengeluaran operator jaringan Tiongkok untuk 5G bisa mencapai \$ 411 miliar (Kania E. B., 2019). Investasi yang cukup besar ini mungkin kurang efisien namun cukup efektif dalam mendorong pembangunan serta mendominasi pasar persaingannya. Amerika Serikat sebagai pesaingnya diketahui belum melakukan inisiatif sebanding dan menawarkan sesuatu yang layak untuk mengalahkan pengembangan 5G ini.

Menjadi penggerak pembangunan inovasi ini dapat menjadikan Tiongkok melampaui ketertinggalannya dalam jaringan sebelumnya (3G dan 4G) melampaui Amerika Serikat. Serta harus kita ingat juga bahwa prinsip utama para tokoh realis salah satunya terdapat dalam permainan *cost and benefit* yang mana adalah untuk menekan sejadi-jadinya penyebab potensi kerugian untuk mencapai keuntungan maksimum. Untuk melengkapi Tiongkok sebagai negara super power, unggul hanya dalam bidang ekonomi tidak lah cukup. Unggul dalam bidang militer juga

tentunya menjadi mimpi para petinggi Tiongkok, untuk itulah Tiongkok mendukung penuh pengembangan jaringan 5G ini yang sangat bermanfaat dalam menunjang kemajuan bidang militer karena kecepatan jaringan ini telah dapat mendukung penyebaran informasi dengan cepat dan juga aksi komando dan kontrol, menimbulkan peningkatan dalam berbagi data, serta telah mencakup konstruksi sistem yang akan ditingkatkan untuk memenuhi persyaratan operasional di masa depan seperti internet militer. maka secara tidak langsung pengembangan jaringan 5G ini merupakan paket lengkap dimana program ini dapat mendorong kemajuan ekonomi juga mendukung aplikasi bidang militer sehingga dapat memberikan keuntungan operasional yang signifikan di medan perang masa depan. Maka dari itu karena daya saing 5G yang hebat, tidak heran bahwa ini merupakan “perlombaan senjata” antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Negara yang mendominasi jaringan 5G ini akan unggul dalam ekonomi, intelijen, dan militer di abad ini. Dengan kata lain melalui pengembangan ini Tiongkok akan menciptakan ketidak seimbangan dan menjadi penguasa tunggal mengalahkan Amerika Serikat. Selain itu salah satu agenda politik Tiongkok adalah berubah dari “*factory of the world*” menjadi pusat inovasi yang mana dengan memenangkan perlombaan 5G ini tidak hanya sukses dalam ekonomi dan militer namun juga mencapai kepentingan politik yang mendasar (Mariani & Bertolini, 2019).

### 3.2 Model Realisme Defensif dalam Mempertahankan Kepentingan Tiongkok

Pada dalam sub bab ini, penulis akan lebih berfokus pada model Realisme Defensif yang dicetuskan oleh Waltz. Sistem internasional merupakan keadaan yang bersifat kompetitif, oleh karena itu ketika suatu negara mengalami yang berbau “ketidakpastian” negara akan selalu memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi tentang tujuan dan niat negara lainnya. Menurut Realisme Defensif Waltz (1979: 126), yang menjadi hal utama dalam sistem yang anarki ini adalah bukan untuk memaksimalkan kekuasaan tetapi bagaimana untuk bertahan di dalam sistem karena tidak semua negara yang berjuang terus menerus memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuatannya, terdapat pula kemungkinan bahwa perjuangan tersebut memiliki tujuan untuk melemahkan negara di dalam sistem yang berpotensi untuk menyulitkan negara mereka. Dituliskan di dalam bukunya yang berjudul *Theory of International Politics* (1979:118) Waltz juga mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan dari suatu negara ditempuh melalui dua cara, yang pertama adalah dengan usaha internal yang mencakup peningkatan ekonomi, kekuatan militer pengembangan strategi yang cerdas. Dan yang kedua adalah usaha internal yang berarti dapat ditempuh dengan memilih untuk memperbesar aliansi atau lebih memilih untuk melemahkan lawan (Waltz, *Theory of International Politics*, 1979).

Di dalam tulisannya, Waltz menyebutkan dua upaya untuk bertahan di dalam sistem yang biasa disebut *bandwagoning* dan *balancing*.

*Bandwagoning* berarti sebuah negara nantinya akan menjalin koalisi dengan negara yang memiliki kekuatan yang lebih besar untuk memaksimalkan kekuatannya dan bertahan di dalam sistem. Sedangkan *balancing* adalah upaya suatu negara dalam menyeimbangkan kekuatan dengan negara lawan agar dapat bertahan di dalam sistem. Dalam studi kasus yang dialami oleh Tiongkok ini, penulis cenderung lebih melihat adanya upaya *balancing* yang dilakukan oleh Tiongkok. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Tiongkok mencoba untuk tetap mempertahankan pengupayaan penyebaran jaringan 5G di Australia.

### **3.2.1 Program Pengurangan Batu bara Di Tiongkok**

Kebangkitan Tiongkok pada abad ke-21 telah menimbulkan berbagai spekulasi. Sorotan dari spekulasi masyarakat internasional muncul dalam berbagai argumen mengenai hal ini terutama mengenai munculnya Tiongkok sebagai kekuatan besar yang akan menjadi pesaing kekuatan – kekuatan besar lainnya seperti Amerika Serikat baik dalam segi politik, militer maupun ekonomi. Hal yang mendasari bangkitnya kekuatan Tiongkok ini adalah pertumbuhan ekonominya yang melaju dengan cukup pesat.

Pada tahun 1978, Pada permulaan reformasi ekonominya, Tiongkok adalah ekonomi terbesar kesepuluh di dunia, dengan PDB sekitar \$ 150 miliar, atau kurang dari 6 persen PDB AS pada saat itu. Namun, pada tahun 2005, ekonomi China, dengan \$ 2,2 triliun, telah



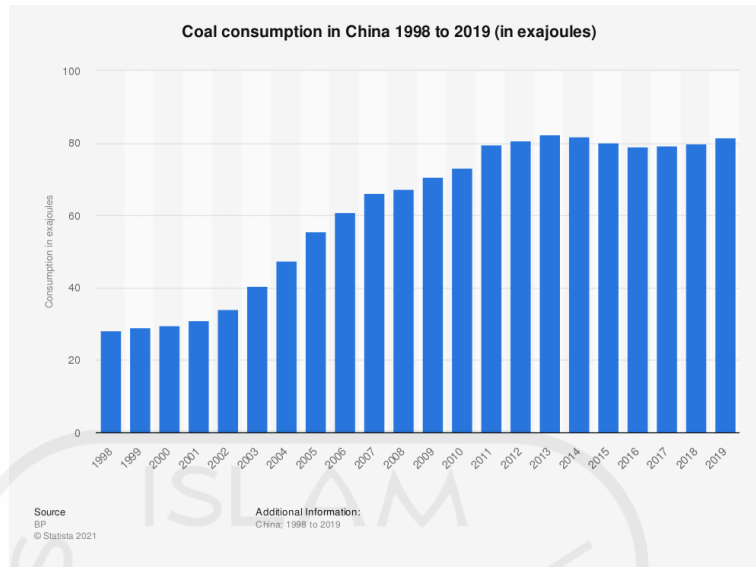
tumbuh menjadi yang terbesar keempat di dunia, di belakang hanya Amerika Serikat dengan \$ 12,5 triliun, Jepang dengan \$ 4,5 triliun, dan Jerman dengan \$ 2,8 triliun. Tiongkok juga memiliki pertumbuhan PDB hampir 10 persen pertahun yang mana hal ini mampu mengangkat lebih dari 800 juta penduduk Tiongkok keluar dari kemiskinan. Dan berkat dari kebangkitannya, dengan hanya dalam waktu 30 tahun Tiongkok sukses bangkit sebagai ekonomi terbesar di Dunia.

*International Energy Agency (IEA)* mengatakan bahwa di dalam bidang pertambangan, Tiongkok juga merupakan produsen sekaligus konsumen batu bara terbesar di dunia karena telah menyumbang hampir setengah dari konsumsi batu bara global. Dalam konteks global, Tiongkok mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2007, Tiongkok masih menjadi salah satu negara pengekspor batu bara sekaligus menjadi pasar impor batu bara untuk negara – negara penghasil batu bara di dunia. Sebelum menginjak tahun 2005, Tiongkok adalah negara dengan eksportir batubara bersih dan pada saat yang sama juga mulai menjadi importir batubara bersih. Pada awalnya, nilai impor batu bara Tiongkok relatif lebih kecil daripada nilai eksportnya. Namun sejak tahun 2005, pertumbuhan angka ekspor batu bara Tiongkok berbanding terbalik dengan nilai impornya yang mana nilai ekspor cukup jatuh mulai pada tahun 2008 dari angka 93,88 juta ton menjadi 45,43 juta ton hingga 7,51 juta ton pada tahun 2013. Dan pada tahun 2017 nilai ekspor hanya mencapai angka 8,17 juta ton yang mana angka ini memiliki selisih sebanyak 7% mengalami

penurunan dari tahun 2016 sedangkan angka impor terus mengalami kenaikan sejak setelah tahun 2005.

Pada rentang tahun 2005 hingga 2013, nilai impor batu bara melonjak cukup pesat. Diketahui pada tahun 2009 Tiongkok telah mengimpor lebih dari 100 juta ton batu bara dan terus meningkat hingga pada tahun 2011 Tiongkok menjadi pengimpor batu bara terbesar di dunia. Pada tahun 2012 impor yang masuk ke Tiongkok mencapai angka 200 juta ton dan 327 juta ton pada tahun 2013 yang menjadi angka tertinggi dengan 6,8% dari konsumsi dalam negeri. Dan pada tahun 2017 angka impor yang masuk masih mencapai angka 271 juta ton yang mana angka ini memiliki perbandingan yang sangat jauh dengan angka ekspor (CNCA, 2018).

Pada tahun 2015 dan 2016, konsumsi batu bara Tiongkok sempat mengalami penurunan yang masing-masing sebesar 3,5% dan 4,7%. Penurunan tersebut diperkirakan terjadi karena beberapa faktor, beberapa diantaranya adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi, restrukturisasi ekonomi atau yang sering dikenal dengan *new normal era*, dan juga upaya Tiongkok untuk wacana meningkatkan kualitas udara dan melawan perubahan iklim (Xianbing Liu, 2019).



Gambar 1. *China - coal consumption 1998-2019. Published by (Garside, 2021) on Statista.*

Administrasi Tenaga Listrik Nasional memperkirakan bahwa kenaikan konsumsi listrik akan melambat menjadi sekitar 3,6 hingga 4 persen selama tahun 2016 hingga 2020 dibandingkan dengan 12 persen pada tahun 2011, yang mengakibatkan kelebihan kapasitas tenaga batu bara (Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, 2016). Kebijakan baru-baru ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan batubara melalui kontrol yang ketat dengan menghentikan pembangkit listrik tenaga batubara baru dan memotong kelebihan kapasitas pembangkit listrik tenaga batubara. Pada awalnya, pembangkit listrik tenaga batu bara menggunakan 1,95 miliar ton fisik batu bara pada tahun 2017, menyumbang 51,3% dari total 3,79 miliar ton batu bara yang digunakan pada tahun yang sama (Huang, 2018).

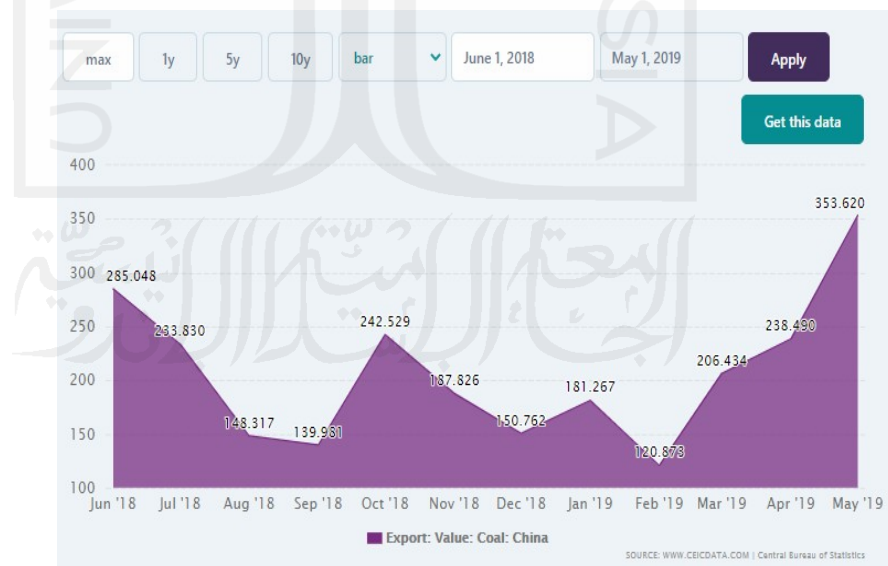
Pada tahun 2016, National Development and Reform Commission Republic of China (NDRC) yang merupakan komisi yang bertanggung jawab atas perencanaan makro ekonomi Tiongkok termasuk merumuskan dan melaksanakan strategi untuk pembangunan ekonomi dan sosial nasional dan mengkoordinasikan operasi ekonomi utama (NDRC, 2018) dan *National Energy Administration* (NEA) mulai menetapkan target wajib untuk mengurangi pangsa batubara dalam total konsumsi energi menjadi tidak lebih dari 58% pada tahun 2020, dari pangsa 64% pada tahun 2015. Hal ini telah menyebabkan pergeseran yang cukup signifikan dalam struktur energi Tiongkok. Sejalan dengan itu, energi non-fosil akan berkontribusi pada sekitar 15% penggunaan energi primer, dan pangsa gas alam akan meningkat menjadi sekitar 10% pada tahun 2020 (NDRC dan NEA, 2016). Hal ini juga dapat menjadi salah satu faktor akan kebijakan larangan yang telah ditetapkan Tiongkok mengenai impor batu baranya yang diambil dari Australia. Karena menurut data yang diambil dari (NBSC, 2018), Pangsa batubara Tiongkok dalam total konsumsi energi turun menjadi 62,0% pada 2016, 60,4% pada 2017, dan di bawah 60% untuk pertama kalinya pada 2018 (Ruan, 2019). Minyak, gas alam dan lain-lain (energi primer non fosil) masing-masing menyumbang 18,8%, 7,0% dan 13,8% pada tahun 2017. Untuk mencapai kebijakan tersebut, pada Januari 2017 sebanyak 101 proyek pembangkit listrik tenaga batu bara mulai ditangguhkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, adanya fenomena kebijakan pemberhentian impor batu bara Australia juga sedikit banyak membantu Tiongkok dalam

mewujudkan tujuan Tiongkok untuk mengurangi penggunaan batu bara menuju udara bersih.

Tetapi hal yang cukup disayangkan adalah, pemberhentian kebijakan ini merupakan kebijakan sepihak yang diputuskan oleh Tiongkok. Pada bab – bab sebelumnya, penulis telah menerangkan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh Tiongkok ini dikeluarkan tidak lama setelah Australia memutuskan untuk melarang pengembangan jaringan 5G Huawei mengikuti US. Di dalam paham Waltz seringkali mengatakan bahwa kita sekarang hidup di dalam tatanan dunia yang memiliki sistem anarkis, di mana sistem ini keamanan negara tidak terjamin. Jadi dalam hal ini keamanan merupakan tujuan tertinggi dengan keadaan di mana rasa saling tidak percaya dan ketidakpastian mengenai ambisi negara lain. Waltz juga mengatakan bahwa sistem anarkis mendorong suatu unit (negara) untuk mencari keamanannya. Pada hal ini dalam upaya untuk melindungi kepentingan negaranya, penulis melihat bahwa Tiongkok memutuskan untuk menggunakan otoritas kekuasaannya untuk menanggapi respon Australia tersebut di mana menggunakan kekuasaan merupakan salah satu alat politik terpenting yang dapat digunakan oleh para aktor. Sejatinya, nasib Tiongkok pada saat itu tergantung pada tanggapan atau respon yang diberikannya terhadap pelarangan yang dilakukan oleh Australia terhadap salah satu program unggulan mereka. Jadi secara tidak langsung digambarkan bahwa nasib sebuah negara dapat tergantung pada tanggapannya terhadap apa yang telah dilakukan oleh negara lain, maka dari itulah mengapa muncul yang dinamakan

perlombaan senjata, persaingan di bidang teknologi maupun militer, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan bukan untuk memaksimalkan kekuasaan, melainkan untuk menyeimbangkan kembali kekuasaan mereka serta mempertahankan posisi mereka terhadap tujuan ataupun ambisi awal yang telah Tiongkok bangun. Lagi-lagi, ini adalah bentuk dari paham neorealis yang melihat salah satu akibat fenomena sistem anarkis yang ada di tatanan dunia.

Salah satu hal yang memperlihatkan adanya fenomena politik yang berperan dalam kebijakan ini adalah walaupun dengan melakukan pemberhentian impor ini dapat membantu program Tiongkok dalam mewujudkan udara bersih Tiongkok, namun pada faktanya Tiongkok masih melakukan impor batu bara dari negara lain salah satu contohnya adalah Indonesia.



Gambar 2. Data nilai ekspor batu bara Indonesia ke Tiongkok sejak Juni 2018 – Mei 2019.

Menurut data di atas, angka ekspor Indonesia ke Tiongkok dari tahun 2018 ke tahun berikutnya yaitu 2019 mengalami peningkatan meskipun di beberapa bulan menuju bulan Mei 2019 sempat mengalami beberapa penurunan. Menurut wawancara yang dilakukan oleh CNBC Indonesia pada tanggal 26 November 2020 lalu, Hendra Sinadia yang merupakan Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia mengatakan bahwa rata-rata ekspor batu bara ke Tiongkok per tahunnya mengalami peningkatan hingga 13,3%. Bahkan pada November 2020 lalu, APBI (Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia) telah menandatangani kesepakatan untuk bekerja sama dengan CCTDA atau *China Coal Transportation and Distribution Association* untuk meningkatkan ekspor batu bara dari Indonesia ke Tiongkok sebesar US\$ 1,46 miliar atau setara dengan Rp. 20,6 triliun (Umah, 2020).

Dengan pemberlakuan larangan impor batu bara Tiongkok yang hanya diberlakukan kepada Australia dan diputuskan secara sepihak ini, penulis beranggapan hal ini merupakan upaya Tiongkok untuk menyeimbangkan kekuasaan yang merupakan hasil dari politik internasional yang berasal dari tindakan sebuah negara yang mana dalam hal ini adalah Australia dengan kebijakan *banned* Huaweinya. Karena jelas diketahui dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, ketika Huawei dibanned oleh pemerintah Australia, pemerintah Tiongkok sempat mengeluarkan beberapa *statement* sebagai peringatan terhadap Australia untuk memikirkan kembali atas kebijakan pelarangannya terhadap Huawei karena akan memungkinkan memperburuknya hubungan dagang antara

Australia dan Tiongkok. Dan saat ini dapat dilihat bahwa fakta yang ada di lapangan membuktikan pernyataan tersebut adalah benar adanya. Sementara itu, melihat dari tindakan ini adalah sesuai dengan ideologi yang telah dianut oleh Tiongkok. Menurut Lampton (2014), “RRT tidak terlalu cenderung menggunakan kekerasan untuk membatalkan pengaturan sebelumnya, tetapi akan menggunakan pengaruh diplomatik dan ekonomi untuk mendorong penyesuaian.” Pernyataan ini cukup mencerminkan fenomena yang telah terjadi. Untuk menyeimbangkan kekuasaannya terhadap Australia yang telah membuat langkah yang jika dilihat dari kacamata Tiongkok tidak menguntungkan negara mereka, Tiongkok akhirnya menggunakan pengaruh diplomatiknya terutama dalam hal pengaruh ekonominya. Dijelaskan dalam (Liu & Hao, 2014), dalam survey pendapat tahun 2011, 75% warga Australia setuju bahwa "Pertumbuhan Tiongkok baik untuk Australia", bahkan lebih baik daripada pengaruh yang dibawa oleh Amerika Serikat. Lebih dari 65% responden menyatakan bahwa perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Tiongkok akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan standar hidup Australia. Sebanyak 85% mengatakan bahwa komunitas bisnis di daerah pemilihan mereka memandang fenomena 'kebangkitan ekonomi Tiongkok' adalah peluang yang signifikan. Sekitar 75% anggota parlemen merasa bahwa peningkatan ekspor Australia ke China akan "sangat berpengaruh", dan 20% nya merasa akan "cukup berpengaruh" dalam menentukan karakter masa depan dari hubungan Australia-China.”



Dengan mengetahui bagaimana posisi negara mereka membantu mempengaruhi keberlangsungan ekonomi Australia, Tiongkok dengan sigap memanfaatkan hal tersebut untuk mempengaruhi keputusan Australia yang berhubungan dengan kepentingan negaranya. Tindakan yang dilakukan Tiongkok memungkinkan adanya perubahan pikiran pemerintah Australia terkait dengan kebijakan *banned* nya, melihat pengaruh Tiongkok yang cukup besar terhadap perekonomian Australia. Adapun alasan mengapa mereka melakukannya adalah karena karakteristik anarkis dari sistem internasional seperti yang diasumsikan Waltz.

### 3.2.2 Penyelidikan Wabah Covid-19 di Tiongkok

Pada beberapa tahun yang lalu tepatnya pada Desember 2019 lalu, Dunia Internasional dihebohkan dengan suatu wabah yang menyerang hingga lintas global. Wabah ini berasal dari Tiongkok tepatnya dari kota Wuhan, Hubei. Wabah ini diduga berasal dari salah satu pasar yang terdapat di kota tersebut dan dapat menyerang hewan serta manusia. Menurut data dari Kementerian Kesehatan Indonesia, pada manusia virus ini biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) (Kemenkes.go.id, 2020). Secara umum wabah ini hampir menyerupai SARS, hanya saja penyebarannya jauh lebih cepat. Karena tingginya laju penyebaran virus ini, hampir seluruh negara

sepakat untuk menutup akses bepergian baik ke dalam maupun keluar negara mereka. Dampaknya beberapa kegiatan harus dihentikan dan ditunda termasuk ekspor impor dalam bidang perekonomian karena akan menimbulkan potensi yang akan memperparah keadaan. Menurut data yang dikutip dari (The Guardian, 2020) kasus pertama dari covid 19 ini terjadi pada 17 november 2 tahun silam, mereka mengatakan bahwa “Seorang pria berusia 55 tahun dari provinsi Hubei adalah orang pertama yang tertular Covid-19. Dan setelah sekitar satu bulan dari tanggal tersebut, ada satu hingga lima kasus baru yang dilaporkan setiap harinya, dan pada 20 Desember ada 60 kasus yang dikonfirmasi.” Hingga pada pertengahan tahun 2020 tepatnya pada tanggal 12 Juli 2020, *World Health Organisation* (WHO) mengeluarkan data bahwa terdapat sekitar 12 juta lebih kasus covid 19 dan angka kematian mencapai lebih dari 500 ribu kasus.

Sadar akan tingginya dampak yang ditimbulkan oleh virus ini, para tenaga medis mau tidak mau bekerja sekeras mungkin untuk mendapatkan penawar atau obat untuk virus ini yaitu vaksin. Salah satu hal baiknya adalah, pengembangan vaksin ini relative cepat daripada vaksin-vaksin lainnya karena teknologi pengembang yang digunakan telah dikembangkan sejak 2003 untuk membuat vaksin dari virus sebelumnya yaitu MERS dan SARS (kompas.com, 2020). Meskipun sudah ada sedikit titik terang akan perkembangan virus Covid 19 ini, namun konflik masih terus berlanjut. Pada tahun 2020 lalu, Tiongkok dan Amerika Serikat kembali bersitegang terkait asal muasal virus corona ini. Donald Trump

beranggapan bahwa Tiongkok tidak transparan mengenai asal muasal virus ini. Maka dari itu timbul lah mosi yang berisi penuntutan untuk dilakukannya penyelidikan ulang mengenai asal wabah covid 19. Mosi ini direspon dengan cukup aktif oleh masyarakat internasional, tercatat bahwa mosi ini telah didukung oleh 122 negara, termasuk anggota Uni Eropa dan Kelompok Afrika, Inggris, Rusia, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Mosi tersebut menyerukan kepada direktur jenderal WHO untuk “memulai proses bertahap dari evaluasi yang tidak memihak, independen dan komprehensif, termasuk menggunakan mekanisme yang ada, yang sesuai, untuk meninjau pengalaman yang diperoleh dan pelajaran yang dipetik oleh WHO menanggapi Covid-19 ” (Hurst, Australia hails global support for independent coronavirus investigation, 2020). Dr Leendertz mengatakan bahwa tujuan dari penyelidikan ini bukanlah untuk membuktikan kebenaran mengenai negara mana yang benar atau yang salah, melainkan untuk mencari tahu kapan virus corona mulai menyebar dan apakah virus itu memang benar-benar berasal dari Wuhan (BBC News, 2020).

Pada April 2020, Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne mengatakan kepada program Insiders ABC bahwa Australia akan mendorong penyelidikan internasional independen terhadap wabah COVID-19 (ABC News, 2020). Australia juga merupakan salah satu negara yang memberikan banyak sponsor dalam penyelidikan ini. Mendengar hal tersebut pemerintah Tiongkok cukup kesal dan kecewa terhadap Australia. Hubungan antara kedua negara tersebut yang telah

buruk sebelumnya tampaknya kian akan bertambah buruk. Tiongkok beranggapan bahwa disini Australia telah menjadi kaki tangan dari Amerika Serikat. Merespon hal ini, Tiongkok mencoba untuk memperingatkan Australia dengan membahas hubungan bilateral mereka. Tiongkok mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Australia ini akan mempengaruhi kegiatan ekspor impor mereka. Di dalam wawancara beberapa media, kementerian Tiongkok seringkali mengatakan bahwa mereka kerap mengharapkan bahwa yang terjadi di antara kedua negara ini mendapatkan titik tengah serta memperdalam rasa saling percaya antara satu sama lain sehingga dapat memberikan hasil yang saling menguntungkan bagi keduanya (Bloomberg, 2020).

Alhasil, langkah yang diambil Tiongkok adalah tergantung dari bagaimana sikap Australia menangani ketegangan yang telah terjadi selama ini. Pada Mei 2020 lalu ketika ketegangan antara kedua negara ini meningkat yang disebabkan oleh penyeruan akan penyelidikan kasus Covid 19 ke Tiongkok oleh Australia. Tiongkok telah mengambil tindakan untuk memberlakukan tarif 80% bea masuk anti dumping bagi jelai Australia selama 5 tahun yang mana hal tersebut telah resmi berlaku sejak 19 Mei 2020. Setelah berita mengenai pemberlakuan tarif bea masuk anti dumping terhadap jelai menyebar, Tiongkok selanjutnya memboikot ekspor daging sapi yang masuk yang berasal dari Australia. Adapun perusahaan-perusahaan yang diboikot oleh Tiongkok adalah Kilcoy Pastoral Company, Beef City, Dinmore dan Northern Cooperative Meat Company. Atas kejadian tersebut, Australia berencana untuk melaporkan

Tiongkok kepada WTO atas dasar pelanggaran mengenai perjanjian perdagangan yang telah ditandatangani oleh keduanya.

Jika kita lihat pada kasus tersebut, hal yang dilakukan oleh Australia ini tidak menunjukkan itikad baik sedikitpun untuk memperbaiki hubungan ekspor impor dengan Tiongkok, terlihat ketika Tiongkok bersikeras untuk menolak penyelidikan tersebut tetapi justru Australia bahkan mendukung penuh penyelidikan tersebut. Tepat seperti apa yang telah dikatakan oleh Waltz, bahwa negara yang memiliki *power* lebih akan terus berusaha untuk mempertahankan apa kepentingannya sedangkan negara yang cenderung lebih lemah akan mencari aliansi yang lebih kuat darinya untuk menyaingi kekuatan musuhnya. Hal ini terlihat dari bagaimana Australia mencoba untuk mencari perlindungan ke WTO akan apa yang dilakukan oleh Tiongkok. Sedangkan seperti upaya yang sudah-sudah, Tiongkok sebagai negara yang memiliki *power* lebih terus mencoba untuk mempertahankan kepentingannya. Dari kasus yang satu ini terlihat jelas bahwa hubungan diplomatik kedua negara ini terus menerus mengalami peregangannya.

Dengan adanya kasus penyelidikan covid 19 ini tidak menutup kemungkinan akan terus membuat Tiongkok memboikot batu bara Australia, bahkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sekarang bukan hanya batu bara saja yang distop pendistribusiannya, tetapi juga beberapa produk lainnya dari Australia seperti impor daging sapi Australia juga ikut diberhentikan. Jika Australia terus bersikeras untuk bersikap seolah-olah berada dipihak yang berlawanan dengan

Tiongkok, maka tidak akan menutup kemungkinan akan ada tindakan yang lebih keras dari kejadian ini. Terlebih lagi Tiongkok adalah negara yang sudah terkenal sebagai negara yang “sudah terbiasa” untuk melakukan pemaksaan ekonomi pada beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2010 lalu, Tiongkok memberlakukan pemaksaan ekonomi terhadap Jepang dengan cara memangkas kuota ekspor logam tanah sebesar 72% dengan alasan masalah lingkungan. Kejadian tersebut terjadi tepat setelah Jepang menahan nahkoda kapal Tiongkok yang bertabrakan dengan kapal Jepang di Pulau Senkaku yang memang sedang disengketakan. Pada saat itu posisi Tiongkok sangat mendukung karena Tiongkok menguasai sekitar 97% produksi oksida tanah pasar global. Negara lainnya yang mengalami peristiwa serupa adalah Mongolia. Hubungan yang tidak baik yang terjalin antara Tiongkok dan Dalai Lama mengakibatkan berimbasnya ke negara lain yang mencoba untuk berhubungan dengan Dalai Lama. Pada tahun 2016 lalu, Dalai Lama mengunjungi Mongolia dan mengadakan acara publik. Tidak lama setelah kabar tersebut menyebar, Tiongkok bereaksi dengan menaikkan biaya untuk produk pertambangan, selain itu Tiongkok juga menahan beberapa kesepakatan bilateral termasuk menahan investasi infrastruktur senilai \$4,2 miliar yang akan dipinjamkan ke Mongolia dan mengakibatkan efek buruk koersif di Ulan Bator. Dengan cara tersebut, Tiongkok berhasil membuat Mongolia mengalah dan membuat pernyataan permintaan maaf ke publik untuk melindungi kondisi domestiknya. Dahulu, Mongolia sempat mengabaikan ancaman Tiongkok atas kebijakannya yang satu ini. Namun

karena pada saat itu senilai 84% ekspor Mongolia dipasarkan ke Tiongkok, hal tersebut membuat Mongolia terlalu bergantung pada Tiongkok.

Selain kedua negara yang telah dipaparkan secara singkat di atas, masih ada beberapa negara lainnya yang mengalami pemaksaan ekonomi oleh Tiongkok seperti Norwegia terkait dengan Sengketa Hadiah Nobel, Filipina terkait sengketa maritimnya pada tahun 2012-2016, Iran dengan program senjata nuklirnya, Taiwan dengan pemilunya pada tahun 2016, Korea Selatan terhadap penerapan THAAD (*Terminal High Altitude Area Defense*), dan Korea Utara dengan program nuklirnya (Peter Harrell, 2018). Maka dengan adanya contoh kejadian-kejadian tersebut, tidak akan menutup kemungkinan Tiongkok masih akan dengan seenaknya melakukan pemboikotan produk lainnya dari Australia demi mempertahankan kepentingannya, mengingat Tiongkok adalah tujuan pasar terbesar bagi Australia untuk sebagian besar produknya seperti Anggur dan Susu dengan keuntungan yang mencapai \$754 juta dan \$564 juta.

### **3.2.3 Sengketa Laut China Selatan**

Laut China Selatan merupakan area strategis yang berbatasan langsung dengan perairan Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan China. Sengketa laut ini sebenarnya telah bermula sejak tahun 1950-an dengan diklaimnya beberapa pulau oleh

Tiongkok yang selanjutnya diikuti oleh Vietnam. Tetapi walaupun seperti itu, belum ada satupun negara yang terlihat memiliki otoritasnya di wilayah ini. Beberapa tahun setelah itu, beberapa negara lainnya mulai melakukan klaim yang sama terhadap beberapa wilayah di sana. Perebutan wilayah di sana disebabkan oleh posisi yang strategis bagi sebagian besar pelayaran niaga dunia, dan juga merupakan sub-kawasan ekonomi yang penting di Indo-Pasifik. Laut ini juga dapat membantu perkembangan ekonomi bagi negara-negara yang berbatasan dengan wilayah tersebut. Laut Cina Selatan juga memiliki daerah penangkapan ikan yang kaya dan juga memiliki cadangan minyak dan gas yang belum ditemukan (lowyinstitute.org, 2021). Hal tersebut membuat negara-negara makin menggebu-gebu untuk mengklaim wilayah di daerah tersebut. Dengan adanya kejadian tersebut PBB memberlakukan hukum laut yang dikenal dengan UNCLOS, walaupun pada akhirnya pemberlakuan hukum tersebut tidak efektif.

Pada beberapa tahun terakhir, Tiongkok kembali berupaya untuk meningkatkan klaimnya di wilayah tersebut. Tiongkok mengklaim 90 persen pulau dan perairan disana serta membangun pelabuhan, instalasi militer, dan landasan terbang di Kepulauan Paracel dan Spratly yang masing-masing memiliki 27 pos terdepan, memiliterisasi Pulau Woody dengan mengerahkan jet tempur, rudal jelajah, dan sistem radar serta mengklaim mayoritas perairan Laut Cina Selatan sebagai milik mereka. Mereka menyebutnya sebagai *Nine Dash Line*. Mengetahui hal tersebut, banyak negara yang melakukan upaya untuk menentang klaim Tiongkok



tersebut termasuk pemerintahan AS. Meskipun Amerika Serikat bukanlah negara yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut, namun tindakannya itu merupakan sebuah upaya untuk melindungi kepentingannya di beberapa bidang. Selain itu menurut Amerika Serikat kawasan Laut China Selatan merupakan kawasan yang bebas sehingga dapat digunakan dan dilintasi oleh seluruh negara. Pada tahun 2020 lalu, Amerika Serikat telah meningkatkan aktivitas militer termasuk kegiatan armada lautnya di kawasan itu dalam beberapa tahun terakhir, termasuk operasi kebebasan navigasi untuk memastikan akses yang bebas dan terbuka ke Laut China Selatan dan menunjukkan bahwa negaranya akan turut aktif terlibat dalam sengketa laut tersebut (Council on Foreign Relations, 2021). Akibatnya, meningkatnya latihan dan penempatan militer di Laut China Selatan serta hubungan AS dan Tiongkok yang semakin mengalami kemerosotan. Sebelumnya kedua negara ini memang telah memburuk salah satunya akibat fenomena penyelidikan Covid 19 di Tiongkok. Diketahui bahwa AS memerintahkan penutupan konsulat China di Houston, Texas dan juga sebaliknya Tiongkok merespon dengan menutup konsulat AS di Chengdu. Dalam kasus ini menteri luar negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa Tiongkok sepenuhnya telah melanggar hukum. Hal tersebut mendapatkan tanggapan dari Tiongkok yang mengatakan bahwa AS sengaja mendistorsi fakta dan hukum internasional.

Ditengah situasi yang sedang memanas tersebut, Amerika Serikat mengajak beberapa negara lainnya termasuk Australia untuk mengikuti

jejak Amerika Serikat dalam upaya kepemimpinannya dalam menentang klaim Tiongkok atas Laut China Selatan. Selain menjalin hubungan dengan Tiongkok, Amerika Serikat juga merupakan aliansi Australia dalam dasar keamanan Australia. Perang US dan Tiongkok akibat sengketa Laut China Selatan ini membuat Australia mengalami dilema. Amerika Serikat meminta Australia untuk mengikuti jejaknya dalam latihan kebebasan navigasi di laut yang mana hal ini beresiko untuk membuat Tiongkok semakin marah. Namun pada 25 Juli 2020 lalu, Australia menyatakan keputusannya dalam deklarasi kepada PBB, secara resmi mengakui penolakannya terhadap klaim Tiongkok di Laut China Selatan. Hal tersebut terlihat bahwa Australia mulai berpihak ke Amerika Serikat. Australia mengatakan bahwa tindakan Tiongkok menggambar garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar laut atau pulau-pulau di Laut China Selatan tidak memiliki dasar hukum. Deklarasi yang disampaikan kepada PBB tersebut berbunyi “Australia menolak klaim China atas 'hak bersejarah' atau 'hak dan kepentingan maritim' sebagaimana ditetapkan dalam 'perjalanan panjang praktik sejarah' di Laut China Selatan” (BBC News, 2020). Faktanya, Australia memang memiliki kepentingan tersendiri akan laut tersebut baik secara ekonomi maupun geopolitik. Australia memang belum mengikuti jejak AS dalam menerapkan operasi kebebasan navigasi di laut, namun sejak 1980 Australia telah melakukan pengawasan udara sendiri di Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia, yang disebut Operation Gateway. Patroli ini

dilakukan oleh pesawat maritim P-3 Orion dan beberapa di antaranya telah ditentang secara lisan oleh Tiongkok.

Di dalam laman resminya, pemerintah Australia mengakui bahwa Tiongkok telah memberikan peringatan tentang “langkah-langkah serius” jika Australia berusaha untuk menantang klaim Beijing melalui operasi angkatan laut. Namun pada faktanya Australia memutuskan untuk melakukannya. Diketahui akhir Juli 2020 lalu antara Australia dan kementerian pertahanan dan luar negeri AS, kedua negara ini telah mencapai kesepakatan untuk melakukan lebih banyak latihan militer bersama di Laut Cina Selatan (Massola, 2020). Dengan adanya kejadian ini tidak heran bahwa hubungan Tiongkok dan Australia akan terus mengalami perosotan. Setelah diboikotnya batubara, daging sapi dan pemaksaan ekonomi lainnya yang dilakukan Tiongkok terhadap Australia, tidak heran jika Tiongkok nantinya akan melakukan tindakan yang serupa untuk merespon tindakan Australia. Keterlibatan Australia terhadap sengketa Laut China Selatan telah membawa hubungan kedua negara ini berada dititik yang sangat rendah, konsekuensi akan memburuknya hubungan kedua negara ini di segala aspek (tidak hanya di bidang politik) terutama di hubungan dagang akan sangat terancam. Melalui kejadian ini Australia terlihat seperti tidak memahami dari kejadian yang telah berlalu, melihat respon Tiongkok terhadap kejadian-kejadian sebelumnya yang merupakan upaya untuk kembali menyeimbangkan kekuasaannya, posisi ekspor anggur dari Australia ke Tiongkok dapat dibilang terancam

berakhir dengan nasib yang sama seperti batu bara, jelai dan juga daging sapi.

Diketahui dari sebuah laporan oleh (Hanson et al., 2020) menyebutkan bahwa dalam 10 tahun terakhir dugaan kasus Diplomasi Koersif oleh Tiongkok mengalami peningkatan sejak 2018. Ditemukan bahwa dari 27 negara yang terkena dampak, Australia menjadi sasaran jumlah kasus tertinggi dengan 17 kasus diikuti oleh Kanada 10 kasus dan Amerika Serikat 9 kasus. Sejauh ini respon pemerintah Tiongkok terhadap insiden ini adalah kecaman-kecaman yang ditujukan kepada Australia namun peneliti yakin jika hubungan ini tidak kian membaik maka akan ada pemaksaan ekonomi lainnya oleh Tiongkok terhadap Australia. Portal berita yang dikelola oleh pemerintah Tiongkok, Global Times juga menerbitkan artikel yang mengatakan bahwa Australia akan dihadapkan pada konsekuensi yang tak tertahankan karena merusak hubungannya dengan Tiongkok setelah Canberra merilis pernyataan bersama dengan AS ketika Konsultasi Menteri Australia-AS (AUSMIN) ke-30 yang menyangkal klaim maritim China. Selain itu, meningkatnya sentimen anti Tiongkok di Australia akan menghambat hubungan ekonomi. Pada tahun 2016, Tiongkok telah melakukan pembatasan perdagangan terhadap Australia pada tahun 2016 menurut *Australian Financial Review*, dengan otoritas yang dimilikinya Tiongkok telah memblokir setidaknya sembilan pengiriman susu pasteurisasi dari Australia dan mengumumkan bahwa mereka akan memperkuat pengawasan atas impor susu Australia, blokade ini diduga sebagai tanggapan Tiongkok atas kritik Australia terhadap

kegiatan reklamasi tanah Tiongkok di Laut China Selatan dan penolakannya terhadap dua proposal investasi besar China. (Hanson et al., 2020, pg 31). Kejadian ini hampir serupa dengan insiden pelarangan ekspor batubara Australia ke Tiongkok. Maka sengketa Laut China Selatan ini jelas telah mendorong terealisasinya pemboikotan Tiongkok terhadap produk-produk Australia karena insiden ini telah membawa hubungan Australia dan Tiongkok berada diujung tanduk.



## BAB IV

### KESIMPULAN

#### 4.1 Kesimpulan

Hubungan bilateral yang terjalin antara Tiongkok dan Australia sudah berlangsung cukup lama. Tidak hanya menjalin hubungan dalam sektor ekonomi saja, kedua negara inipun menjalin kerja sama dalam sektor lainnya, contoh lainnya adalah pendidikan. Melihat hubungan yang terjalin antar kedua negara ini cukup potensial untuk satu sama lain, maka hubungan antara kedua negara ini sempat mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu sejak pertama kali kedua negara ini berhubungan. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya sebuah perjanjian dalam segi ekonomi yang mengikat keduanya. Perjanjian itu bernama ChAFTA atau *China-Australia Free Trade Agreement* yang mendapatkan kesepakatan secara resmi antar kedua belah pihak pada bulan Juni 2015 dan secara resmi berjalan pada bulan Desember 2015. Kedua negara ini berkomitmen dalam hal bekerja sama untuk memberikan kemudahan akses bagi kedua negara dalam menjalankan kegiatan ekspor impor. Namun dalam menjalin hubungan kerja sama tidak jarang masing-masing pihak mengalami kendala dalam penerapannya, tidak terkecuali kedua negara ini.

Seperti yang telah digambarkan dalam penelitian ini, hubungan antara Tiongkok dan Australia dalam jangka waktu 2018-2020 tengah mengalami penurunan dalam hal keharmonisan. Di dalam penelitian ini

penulis berfokus terhadap faktor yang mempengaruhi kasus ekspor batu bara Australia ke Tiongkok yang diberhentikan secara mendadak. Dengan menggunakan kaca mata gabungan dari realisme ofensif dan defensif, penulis menjabarkan *timeline* dengan mengambil 3 contoh studi kasus yaitu adanya pelarangan pengembangan 5G Huawei di Australia, pengurangan konsumsi batu bara Tiongkok dan penyeruan penyelidikan wabah covid-19 yang diserukan oleh Australia. 3 komponen ini memiliki pengaruh yang penting dalam menjabarkan dan menjelaskan *timeline* pemboikotan yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Australia.

Sebelum kasus mengenai diberhentikannya ekspor batu bara Australia ke Tiongkok terjadi, hubungan antar kedua negara ini telah mengalami kelonggaran terlebih dahulu akibat dilarangnya masuknya pengembangan 5G Huawei ke Australia. Kasus ini terjadi tepat sebelum Tiongkok memberlakukan kebijakan sepihaknya tersebut sehingga hal itulah yang menimbulkan hipotesa mengenai faktor utama kebijakan pelarangan ekspor batu bara tersebut. Semangat Tiongkok dalam mengembangkan program 5G Huawei sangatlah tinggi, hal ini dapat kita lihat dari apa saja yang telah dilakukan Tiongkok untuk mendukung pengembangan program ini. Hal yang telah diupayakan oleh Tiongkok juga tidak bernilai kecil karena dengan adanya program ini membuat Tiongkok dapat memaksimalkan kekuatannya di dalam sistem seperti apa yang diinginkan para pemikir Realisme Ofensif. Kasus kedua yaitu mengenai pengurangan konsumsi batu bara Tiongkok. Isu mengenai pengurangan konsumsi batu bara Tiongkok ini sudah ada sebelum

Tiongkok memberhentikan ekspor dari Australia. Dalam hal ini Tiongkok memiliki tujuan untuk melakukan pengurangan konsumsi paling lambat di tahun 2020. Hal ini dilakukan dengan tujuan pengurangan polusi udara mengingat sebagian besar pembangkit listrik yang ada di Tiongkok menggunakan bahan bakar batu bara dan polusi dari batu bara cukup berbahaya bagi pencemaran lingkungan. Kasus selanjutnya adalah mengenai penyeruan penyelidikan covid 19 oleh Australia. Hal ini cukup memancing amarah yang serius dari Tiongkok terlebih lagi jika kita lanjut Australia kembali memancing amarah dengan memihak AS dalam kasus Laut China Selatan. Akibat kejadian ini, Tiongkok kembali memboikot beberapa produk yang berasal dari Australia beberapa diantaranya adalah Jelai atau kacang-kacangan dan Daging Sapi.

Jika kita cermati, kasus-kasus diatas memiliki pola yang sama. Dilihat menggunakan kaca mata Neorealisme, *realisme defensif* yang dikemukakan oleh Waltz cukup berhasil menggambarkan peristiwa ini. Tiongkok yang merupakan unit yang memiliki kekuatan yang lebih besar dari Australia telah melakukan *balancing of power* untuk mendorong kepentingannya terhadap pengembangan 5G Huawei yang dituding berbahaya bagi negara lain. Dalam mempertahankan posisi kepentingannya terhadap pengembangan jaringan 5G Huawei, upaya pemberhentian ekspor batu bara Australia yang dilakukan Tiongkok telah cukup menyudutkan Australia mengingat sama seperti kebanyakan negara lainnya, Tiongkok merupakan pasar ekspor utama yang menjadi tujuan Australia tidak hanya komoditas batu bara namun juga pada beberapa



komoditas lainnya. Sampai pada kasus terakhir, pada kasus ini Australia tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki hubungannya dengan Tiongkok. Australia malah terlihat mencari masalah baru dengan Tiongkok terlihat dari sikap Australia yang acuh terhadap ketidaksetujuan Tiongkok akan penyelidikan wabah ini dan berpihak pada AS dalam sengketa Laut China Selatan. Akibatnya, Tiongkok melakukan pemboikotan pada komoditas lainnya (selain batu bara) yang diekspor dari Australia seperti anggur dan daging sapi. Melihat semakin memburuknya hubungan kedua negara ini, kasus ketiga menjadi pendukung bahwa pemberhentian ekspor batu bara Australia ke Tiongkok akan bertahan hingga jangka waktu yang cukup lama.

#### **4.2 Saran**

Penelitian ini berfokus pada faktor yang mempengaruhi kebijakan pemberhentian ekspor batu bara Australia ke Tiongkok pada tahun 2018-2020. Mengingat kasus yang diangkat dapat dibilang merupakan kasus baru, maka kurangnya literature membuat penulis sadar bahwa penelitian ini masih belum mencapai titik maksimal dan masih adanya keterbatasan dalam penulisannya. Di dalam tulisan ini pula penulis seringkali menyiratkan bahwa Amerika Serikat tidak jarang berada diantara kasus yang terjadi antara Tiongkok dan Australia. Studi kasus yang dibahas pada penelitian ini juga akan mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Hal ini dapat terlihat dari timbulnya beberapa peristiwa di setiap tahunnya, maka tidak menutup kemungkinan akan nada kasus-kasus baru

yang diharapkan dapat diteliti oleh penulis selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini.

Selain itu, penjelasan mengenai teori belum terlalu eksplisit dan fokus. Untuk itu, dari keterbatasan-keterbatasan yang ada penulis mencoba untuk memberikan rekomendasi bagi penulis selanjutnya untuk nantinya mencoba menggali lebih dalam terhadap teori yang telah digunakan guna melengkapi penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- ABC News. (2020, May 20). *Australia started a fight with China over an investigation into COVID-19 — did it go too hard?* Retrieved March 20, 2021, from abc.net.au: <https://www.abc.net.au/news/2020-05-20/wha-passes-coronavirus-investigation-australia-what-cost/12265896>
- Adediran, A. A. (2019). Assessing the inflation hedging potential of coal and iron ore in Australia. *Resources Policy*.
- Anna Henderson, S. D. (2020, December 14). *China's The Global Times appears to confirm a ban on Australian coal imports amid perilous trade tensions*. Retrieved February 09, 2021, from Abc.au.net: <https://www.abc.net.au/news/2020-12-14/global-times-reports-australian-coal-exports-blocked-by-china/12983336>
- ASEAN Organization. (2016, October 3). *Regional Comprehensive Economic Partnership*. Retrieved from ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIA NATION: [https://asean.org/?static\\_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership](https://asean.org/?static_post=rcep-regional-comprehensive-economic-partnership)
- Australia, G. (n.d.). *Sumber Mineral di Australia*. Retrieved from Australia Indonesia Institute: <https://dfat.gov.au/about-us/publications/people-to-people/geografi-australia/bab06/index.html>
- Australian Government. (n.d.). *ChAFTA outcomes at a glance*. Retrieved February 08, 2021, from Trade and Investment: <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/chafta/factsheets/Pages/chafta-outcomes-at-a-glance>
- BBC News. (2020, December 17). *Covid-19: WHO akan investigasi asal muasal pandemi virus corona di Wuhan*. Retrieved March 20, 2021, from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55344213>
- Bloomberg. (2020, May 19). *China Considers More Economic Pain for Australia on Virus Spat*. Retrieved April 02, 2021, from Economics: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-19/china-mulls-targeting-australian-wine-dairy-on-coronavirus-spat>
- Brown, S. (2021, February 07). *The Huawei ban explained: A complete timeline and everything you need to know*. Retrieved February 08, 2021, from androidauthority: <https://www.androidauthority.com/huawei-google-android-ban-988382/>
- Burchil, S. (2005). *Theory of International Relations*. Houndmills: MACMILLAN.

- Capling, A. (2008). *Twenty Years Australia Engagement with Asia*. Australia: The Pacific Review.
- Cave, T. U. (2018). Why Australia banned Huawei from its 5G telecoms network. *Australian Strategic Policy Institute*.
- Chatzky, L. M. (2020, August 06). *Huawei: China's Controversial Tech Giant*. Retrieved February 08, 2021, from Council of Foreign Relations: <https://www.cfr.org/backgrounder/huawei-chinas-controversial-tech-giant>
- CHENG, D. (2008). A CHINESE PERSPECTIVE ON THE CHINA-AUSTRALIA FREE TRADE AGREEMENT AND POLICY SUGGESTIONS. *Economic Papers*, 30-40.
- Christine Shearer, N. M.-S. (2018). *MEREKAM PERKEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BATUBARA DI DUNIA*. Retrieved April 02, 2021, from Boom and Bust: [https://endcoal.org/wp-content/uploads/2018/03/BoomAndBust\\_2018\\_Indonesian1.pdf](https://endcoal.org/wp-content/uploads/2018/03/BoomAndBust_2018_Indonesian1.pdf)
- Church, P. (2009). *History of Southeast Asia*. Singapore: John Willey & Sons (Asia) Pte Ltd.
- Clark, A. (2021, January 15). *China Mulls Allowing Some Australian Coal Imports Amid Ban*. Retrieved February 09, 2021, from Market: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-15/china-may-allow-imports-of-some-stranded-australian-coal-cargoes>
- Garside, M. (2021, January 27). *Coal Consumption in China 1998 to 2019*. Retrieved April 20, 2021, from Statista: <https://www.statista.com/statistics/265491/chinese-coal-consumption-in-oil-equivalent/>
- Hao, W. L. (2014). *Australia in China's Grand Strategy*. University of California Press.
- Haris, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hongjin Xiang, Y. K. (2016). Impact of the China–Australia FTA on global coal production and trade. *Journal of Policy Modeling*.
- Huawei Technologies Co., Ltd. (2018, April 12). *Huawei First to Complete IMT-2020 (5G) Promotion Group's Core Network Test for 5G Non-Standalone*. Retrieved April 20, 2021, from Huawei News: <https://www.huawei.com/en/news/2018/4/IMT-2020-5G-Group-Core-Network-Test>
- Huawei. (n.d.). *What is Huawei's relationship with the Chinese government?* Retrieved February 08, 2021, from Huawei Fact:

<https://www.huawei.com/en/facts/question-answer/what-is-huaweis-relationship-with-the-chinese-government>

- Hurst, D. (2020, May 18). *Australia hails global support for independent coronavirus investigation*. Retrieved March 20, 2021, from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2020/may/18/australia-wins-international-support-for-independent-coronavirus-inquiry>
- Ismanto, I. (2010). *Perubahan Ekonomi Global dan Tantangan bagi Indonesia. Tantangan ekonomi untuk Indonesia*.
- Jalil, G. Y. (2019). *China's Rise. Institute of Strategic Studies Islamabad*.
- Jefferson, G. H., Hu, A. G., & Su, J. (2006). *The Sources and Sustainability of China's Economic Growth. Brookings Papers on Economic Activity*.
- Jianliang Wang, L. F. (2013). *An analysis of China's coal supply and its impact on China's future economic growth. Energy Policy*.
- Koizumi, A. S. (2007). *Present State and Outlook of China's Coal Industry. IEEJ*.
- Liu, W., & Hao, Y. (2014). *Australia in China's Grand Strategy. ASIAN SURVEY 54:2, 384-386*.
- Lyke, B. (2016). *Does Trade Openness Matter for Economics Growth in CEE Countries?* Muenchen: Deakin University.
- Mahbubani, K. (2017). *The ASEAN Miracle*. Singapore: Ridge Books.
- Mearsheimer, J. H. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W. W, NORTON & COMPANY.
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: W. W. Nanon & Company.
- NDRC. (2018, September). *National Development and Reform Commission*. Retrieved April 17, 2021, from The US CHINA Business Council.
- Peter Harrell, E. R. (2018). *CHINA'S USE OF COERCIVE ECONOMIC MEASURES. Center for a New American Security*.
- Rahadian, A. (2019, 04 29). *Ini 10 Negara dengan Produksi Batu Bara Terbesar di Dunia*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190429200726-16-69567/ini-10-negara-dengan-produksi-batu-bara-terbesar-di-dunia>
- Reuters. (2021, January 12). *China's ban on Australian coal forces trade flows to realign*. Retrieved February 09, 2021, from Intelligence Asia Australia China Coal : <https://www.mining.com/web/chinas-ban-on-australian-coal-forces-trade-flows-to-realign/#:~:text=China's imports from Australia were,the lowest since January 2015.&text=China's effective ban on imports,importers and two largest exporters>.

- Reuters Staff. (2019, February 21). *Exclusive: China's Dalian port bans Australian coal imports, sets 2019 quota - source*. Retrieved February 08, 2021, from COMMODITIES NEWS: <https://www.reuters.com/article/us-chi%20na-australia-coal-exclusive/exclusive-chinas-dalian-port-bans-australian-coal-imports-sets-2019-quota-source-idUSKCN1QA0F1>
- Sadiaa M., J. R. (2014). *The Oxford Handbook of The International Relations of Asia*. London: Oxford University Press.
- Scott Burchill, A. L.-S. (2005). *Theories of International Relations (Third edition)*. New York: PALGRAVE MACMILLAN.
- Spindler, M. (2013). Neorealist theory. In *International Relations*. Verlag Barbara Budrich.
- Strange, S. (1994). *State and Markets*. New York: Continuum.
- The Guardian. (2020, March 13). *First Covid-19 case happened in November, China government records show - report*. Retrieved April 01, 2021, from Guardian.com: <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>
- Toscano, N. (2021, January 15). *Beijing 'rebuffed' pleas from Chinese steelmakers to lift ban on Australian coal*. Retrieved February 09, 2021, from Mining: <https://www.smh.com.au/business/the-economy/beijing-rebuffed-pleas-from-chinese-steelmakers-to-lift-ban-on-australian-coal-20210114-p56u0c.html>
- Umah, A. (2020, November 26). *Luar Biasa! Ekspor Batu Bara RI ke China Naik 2x Lipat*. Retrieved April 17, 2021, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201126191331-4-205002/luar-biasa-ekspor-batu-bara-ri-ke-china-naik-2x-lipat>
- Waltz, K. (1979). *Theory of International Politics*. Philippines: Addison-Wesley Publishing Company.
- Wang, V. W.-C. (2006). China Economic Statecraft Toward Southeast Asia Free Trade Agreement and "Peaceful Rise". *American Journal of Chinese Studies*, 5-34.
- Whigham, N. (2018, August 23). *Huawei banned from Australian 5G network*. Retrieved February 25, 2021, from News.com.au: <https://www.news.com.au/technology/gadgets/mobile-phones/huawei-banned-from-australian-5g-network/news-story/d1d6ec001747ba51e7c5c8738021f7ee>
- Xianbing Liu, Z. J. (2019). The Current Status and Prospects for Coal Industry Transition in China. *Institute for Global Environmental Strategies*.

- Xu Tang, Y. J. (2016). China's coal consumption declining—Impermanent or permanent? *Resources, Conservation and Recycling*.
- Yueh, L. (2013). WHAT DRIVES CHINA'S GROWTH? *National Institute Economic Review*.
- Adharsyah, T. (2019, February 19). *China Batasi Impor Batu Bara Australia, Indonesia Untung*. Retrieved July 13, 2019, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190219145434-17-56400/china-batasi-impor-batu-bara-australia-indonesia-untung>
- Andrej Pustovitovskij, J.-F.K. (2011). STRUCTURAL POWER AND INTERNATIONAL RELATIONS ANALYSIS. *IEE Working Paper*, Volume 191.
- Choudhury, S. R. (2019, March 28). *Former Australian PM Turnbull explains why his government banned Huawei, ZTE from selling 5G equipment*. Retrieved July 12, 2019, from CNBC: <https://www.cnbc.com/2019/03/28/malcolm-turnbull-on-australias-decision-to-ban-chinas-huawei-and-zte.html>
- Institute, A.-I. (n.d.). *Sumber Mineral di Australia*. Retrieved October 09, 2019, from Geografi Australia: <https://dfat.gov.au/about-us/publications/people-to-people/geografi-australia/bab06/index.html>
- INSTITUTE, W. C. (n.d.). Retrieved October 09, 2019, from [https://www.worldcoal.org/file\\_validate.php?file=coal\\_resource\\_indonesian.pdf](https://www.worldcoal.org/file_validate.php?file=coal_resource_indonesian.pdf)
- Laurenceson, P. J. (2019, March 04). *China's Coal Import "Ban"*. Retrieved July 13, 2019, from Australian Institute of International Affairs:



<https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/chinas-coal-import-ban/>

Mercer, P. (2019, February 23). *Is China Blocking Australian Coal Imports? Canberra Says No*. Retrieved July 13, 2019, from VOA: <https://www.voanews.com/east-asia/china-blocking-australian-coal-imports-canberra-says-no>

News, S. (2019, February 22). *Dollar tumbles as Australia seeks urgent clarification on China's coal ban*. Retrieved July 13, 2019, from SBS News: <https://www.sbs.com.au/news/dollar-tumbles-as-australia-seeks-urgent-clarification-on-china-s-coal-ban>

Reuters. (2019, February 22). *China port bans Australian coal imports*. Retrieved July 12, 2019, from New Crops Australia: <https://www.news.com.au/finance/markets/australian-markets/china-port-bans-australian-coal-imports/news-story/322972b3ed0a1252d4ee4672012e7042>

Reuters. (2019, April 12). *China warns Australia at WTO about 5G restriction*. Retrieved April 12, 2019, from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-huawei-australia-china-wto/china-warns-australia-at-wto-about-5g-restriction-idUSKCN1RO20H>

Reuters. (2019, February 19). *Chinese traders cut Australian coal imports over customs delays*. Retrieved July 13, 2019, from news.com.au: <https://www.news.com.au/world/asia/chinese-traders-cut-australian-coal->



imports-over-customs-delays/news-story/9d35a0ea81e4056c24e6187efeb967b8

Reuters. (2019, February 21). *Exclusive: China's Dalian port bans Australian coal imports, sets 2019 quota - source*. Retrieved July 13, 2019, from www.reuters.com: <https://www.reuters.com/article/us-china-australia-coal-exclusive/exclusive-chinas-dalian-port-bans-australian-coal-imports-sets-2019-quota-source-idUSKCN1QA0F1>

Jalil, G. Y. (2019). China's Rise. *Institute of Strategic Studies Islamabad*.

Kania, E. (2018). Huawei and Australia's 5G Network. *Australian Strategic Policy Institute*.

Kania, E. B. (2019). THE CHINA CHALLENGE IN 5G. *Securing Our 5G Future: The Competitive Challenge and Considerations for U.S. Policy*, 8.

Kemenkes.go.id. (2020, March 06). *Pertanyaan dan Jawaban Terkait Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*. Retrieved April 01, 2021, from kemenkes.id: [https://covid19.kemkes.go.id/download/QnA\\_Coronavirus\\_Updated\\_06032020.pdf](https://covid19.kemkes.go.id/download/QnA_Coronavirus_Updated_06032020.pdf)

Kementerian Perdagangan Indonesia. (2018, May 30). *ASEAN-China Free Trade Agreement*. Retrieved from Kementerian Perdagangan Indonesia: <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/asean/asean-1-fta/asean-china>

Koizumi, A. S. (2007). Present State and Outlook of China's Coal Industry. *IEEJ*.

kompas.com. (2020, December 18). *Lama Waktu Penemuan Vaksin Covid-19, HIV, Kanker, dan Flu*. Retrieved April 08, 2021, from Trend: <https://www.kompas.com/tren/read/2020/12/18/175500165/-klarifikasi-lama-waktu-penemuan-vaksin-covid-19-hiv-kanker-dan-flu-?page=all>

Laporan Triwulan BAPPENAS. (2013). *Perkembangan Ekonomi Indonesia*. Indonesia: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPPENAS.

Lyke, B. (2016). *Does Trade Openness Matter for Economics Growth in CEE Countries?* Muenchen: Deakin University.

Spindler, M. (2013). Neorealist theory. In *International Relations*. Verlag Barbara Budrich.

- The Guardian. (2020, March 13). *First Covid-19 case happened in November, China government records show - report*. Retrieved April 01, 2021, from Guardian.com: <https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/first-covid-19-case-happened-in-november-china-government-records-show-report>
- Toscano, N. (2021, January 15). *Beijing 'rebuffed' pleas from Chinese steelmakers to lift ban on Australian coal*. Retrieved February 09, 2021, from Mining: <https://www.smh.com.au/business/the-economy/beijing-rebuffed-pleas-from-chinese-steelmakers-to-lift-ban-on-australian-coal-20210114-p56u0c.html>
- Zheng, C. (2019). Coal. *The Energy Transition in China*.
- Zheng, C. (2019). The Energy Transition in China. *Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM)*.
- BBC News. (2020, July 25). *What is Australia's position? South China Sea dispute: Australia says Beijing's claims have no legal basis*. <https://www.bbc.com/news/world-australia-53536173>
- Council on Foreign Relations. (2021, June 11). *Territorial Disputes in the South China Sea*. Global Conflict Tracker. <https://microsites-live-backend.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/territorial-disputes-south-china-sea>
- Hanson, F., Currey, E., & Beattie, T. (2020). *The Chinese Communist Party's coercive diplomacy* (36th ed.). Australian Strategic Policy Institute's International Cyber Policy Centre.
- lowyinstitute.org. (2021, JUNE 13). *SOUTH CHINA SEA*. LOWY INSTITUTE. <https://www.lowyinstitute.org/issues/south-china-sea>
- Mariani, L., & Bertolini, M. (2019). Istituto Affari Internazionali (IAI). *The US—China 5G Contest:: Options for Europe*.
- Massola, J. (2020, August 03). *Why is the South China Sea such a hotspot?* The Sydney Morning Herald. <https://www.smh.com.au/world/asia/why-is-the-south-china-sea-such-a-hotspot-20200727-p55fxh.html>